



Pemerintah Kota
Padang Panjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

BAGIAN ORGANISASI SETDAKO PADANG PANJANG

TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. (0752) 84506 padang panjang 27118

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang
3. Yth. Kepala BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Yth. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
6. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang.

Kata Pengantar

Alhamdulillahi rabbil'alamin, Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019** merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada Pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Padang Panjang kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang.

Informasi dalam Laporan Kinerja disajikan secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2019 ini memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian 18 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja sasaran (Indikator Kinerja Utama) yang diperjanjikan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dengan harapan kiranya hal ini dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, April 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Kota Padang Panjang	2
D. Struktur Organisasi	5
E. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	13
B. Indikator Kinerja Utama	28
C. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang	35
B. Realisasi Anggaran	95
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	110
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	3
Tabel 1.2	Luas wilayah, penduduk, dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan/kelurahan Kota Padang Panjang	4
Tabel 1.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang 2018	5
Tabel 2.1	Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	16
Tabel 2.2	Hubungan Komponen Pilar/Misi Dengan Tujuan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	18
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Target Keberhasilan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	23
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang	28
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	35
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019	36
Tabel 3.3	Tujuan I Meningkatnya Perekonomian daerah Yang Berkelaanjutan	39
Tabel 3.4	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	40
Tabel 3.5	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelaanjutan	44
Tabel 3.6	Hasil Survey Indeks Kepuasan Layanan Insfrastruktur Kota Padang Panjang tahun 2019	45
Tabel 3.7	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	52
Tabel 3.8	Sasaran Strategis 3 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	53
Tabel 3.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) Kota Padang Panjang dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota padang Panjang tahun 2017-2019	54
Tabel 3.10	Indeks Gini Kota Padang Panjang	55
Tabel 3.11	Distribusi Pendapatan Kota Padang Panjang tahun 2017-2019	56
Tabel 3.12	Sasaran Strategis 4 menurunnya Angka Pengangguran	58
Tabel 3.13	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	59
Tabel 3.14	Tujuan Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	61
Tabel 3.15	Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya saing Pendidikan	64
Tabel 3.16	Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	68

Tabel 3.17	Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota padang Panjang Per 31 Desember 2019	71
Tabel 3.18	Tujuan 4 Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamis	73
Tabel 3.19	Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Ketentraman dan Ketetiban Umum	74
Tabel 3.20	Sasaran Strategis 9 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	76
Tabel 3.21	Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	79
Tabel 3.22	Aktifitas Keagamaan di Kota Padang Panjang	79
Tabel 3.23	Tujuan 5 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar	82
Tabel 3.24	Rincian Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018-2019	83
Tabel 3.25	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	85
Tabel 3.26	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019	86
Tabel 3.27	Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan melayani	88
Tabel 3.28	Hasil Survey Masyarakat tahun 2019	88
Tabel 3.29	Tujuan 6 Meningkatnya partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	90
Tabel 3.30	Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Peran Serta kelompok/lembaga kemasayarakatan dalam pembangunan	91
Tabel 3.31	Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	94
Tabel 3.32	IDG Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018	95
Tabel 3.33	Pencapaian Kinerja Anggaran	95
Tabel 3.34	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019	105
Tabel 3.35	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019	107
Tabel 3.36	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019	108

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Perbandingan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat dan IPM Kota Padang Panjang Tahun 2019	62
Grafik 3.2	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Rata-Rata Lama Sekolah Sumatera Barat Dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019	65
Grafik 3.3	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional, harapan Lama sekolah tingkat provinsi Sumatera barat dan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019	67
Grafik 3.4	Perbandingan Angka harapan Hidup Nasional, Angka Harapan Hidup Sumatera Barat dan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019	69

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kota Padang Panjang

3

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang ini berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Selain itu pula penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 .

II. MAKSLUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023 .

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas,

transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai laporan Pemerintah Kota Padang Panjang mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2019;
3. Untuk alat kendali/*controlling* bagi kepala Kepala Daerah untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit Organisasi
4. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. GAMBARAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Padang Panjang merupakan kota terkecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05% dari luas Sumatera Barat, terletak antara $100^{\circ} 30'$ Bujur Timur serta $0^{\circ} 32'$ Lintang Selatan. Kota Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar dan diapit oleh Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh yang merupakan dua wilayah dari Kabupaten Tanah Datar

Gambar 1. Peta Padang Panjang



Secara administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas 2300 Ha, masing-masing kecamatan memiliki delapan kelurahan. Padang Panjang memiliki topografi bergelombang dan terletak pada dataran tinggi yang menyebabkan daerah ini terkenal dengan iklim sejuknya dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter dari permukaan laut, diapit oleh tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat serta memiliki curah hujan selama 2018 mencapai 3.961,9 mm.

Kondisi Demografis

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2010-2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 adalah 52.994, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 26.402 jiwa dan penduduk perempuan 26.592 jiwa. Berikut ini rincian perkiraan jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2018, adalah :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Padang Panjang Barat	Silaing Bawah	14.488	14.689	29.177
		Silaing Atas	2.570	2.760	5.330
		Pasar Usang	1.091	968	2.059
		Kampung Manggis	1.801	2.116	3.917
		Tanah Hitam	2.929	2.743	5.672
		Pasar Baru	1.604	1.621	3.225
		Bukit Surungan	682	636	1.318
		Balai-Balai	1.177	1.118	2.295
2.	Padang Panjang Timur		2.634	2.727	5.361
		Koto Panjang	11.731	11.643	23.374
			2.733	2.621	5.354

	Koto Katik	440	435	875
	Ngalau	1.327	1.318	2.645
	Ekor Lubuk	1.294	1.243	2.537
	Sigando	774	751	1.525
	Ganting	1.036	1.087	2.123
	Guguk Malintang	3.357	3.565	6.922
	Tanah Pak Lambik	953	883	1.836

Sumber :Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2019

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Tabel 1.2
**Luas wilayah, penduduk, dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan/Kelurahan
di Kota Padang Panjang**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah	Penduduk	Kepadatan
1.	Padang Panjang Barat	Silaing Bawah	9,75	29.048	2.979
		Silaing Atas	2,61	5.271	2.020
		Pasar Usang	0,54	2.056	3.807
		Kampung Manggis	0,59	3.918	6.641
		Tanah Hitam	3,16	5.637	1.784
		Pasar Baru	0,72	3.216	4.467
		Bukit Surungan	0,23	1.318	5.730
		Balai-Balai	1,21	2.279	1.883
2.	Padang Panjang Timur		13,25	23.374	1.764
		Koto Panjang	1,45	5.128	3.856
		Koto Katik	1,01	874	865
		Ngalau	2,8	2.657	1.832
		Ekor Lubuk	1,4	2.484	887
		Sigando	3,1	1.515	1.082
		Ganting	1,9	2.122	685
		Guguk Malintang	0,26	6.764	3.560
		Tanah Pak Lambik	0,26	1.830	7.038

Sumber :Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat **SLTA/sederajat** dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan
Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang 2018**

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/belum pernah sekolah	0,22	0,10	0,16
Tidak/belum tamat SD	15,08	15,70	15,39
SD/sederajat	14,84	11,49	13,14
SLTP/sederajat	21,08	23,16	22,13
SLTA/sederajat	35,18	28,37	31,74
Diploma I/II/III	3,52	6,94	5,25
Diploma IV/S1	9,47	13,74	11,63
S2/S3	0,62	0,50	0,56

Sumber :Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota.Sekretariat Daerah Kota membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordinasianpenyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

Inspektorat

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur.Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.Inspektorat Daerah Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesua dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
- 2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Permuhan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kentrataman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- 11) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Perikanan; dan
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Badan Daerah Kota

Badan Daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dan selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
- 2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 13 Tahun 2019
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 14 Tahun 2019
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 15 Tahun 2019
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Perwako No. 66 Tahun 2019
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 16 Tahun 2019
6. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 17 Tahun 2019
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 18 Tahun 2019
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 19 Tahun 2019
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 20 Tahun 2019
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 21 Tahun 2019
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 22 Tahun 2019
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 23 Tahun 2019
13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 24 Tahun 2019
14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diatur dengan Perwako No. 67 Tahun 2019
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 26 Tahun 2019
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 27 Tahun 2019
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 65 Tahu 2019
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 29 Tahun 2019
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 30 Tahun 2019

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 31 Tahun 2019
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 32 Tahun 2019
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 32 Tahun 2019
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 40 Tahun 2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No. 41 Tahun 2010

E. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan data SIMPEG Tahun 2019 sebanyak 2005 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 773 orang dan perempuan sebanyak 1.232 orang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Personil Perangkat Daerah, Capaian Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang dan Permasalahan Utama, serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan

target 2019 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2023; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan

segenap potensi sumber daya yang ada.Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Renstra OPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

VISI DAN MISI

Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut **”UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**.

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

- 1) **Untuk Kejayaan Padang Panjang**, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat Perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.

- 2) **Bermarwah**, adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya.
- 3) **Bermartabat**, Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya siang tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan terlaksananya reformasi birokrasi.

Misi

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi ‘Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah dan Bermartabat’ dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskan empat pilar pembangunan Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1) EKONOMI

Untuk mewujudkan pilar ekonomi ini melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Rumah Wirausaha, Bedah warung, SATIMISAKE (Rp 1 Milyar sampai Rp 3 Milyar per kelurahan) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang, Koperasi syariah, Smart Warung.

Di bidang infrastruktur juga direncanakan beberapa kegiatan strategis antara lain pembangunan gedung parkir, penataan pedestrian pasar dan wisata kuliner, revitalisasi *rest area*, pelebaran jalan St.Syahrir, melengkapi sarana prasarana pasar, smart transportasi, rehab rumah tak layak huni, dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

2) PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pendidikan, sosial, keagamaan pada bidang pendidikan diprioritaskan pada beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Guru dan Murid Para Juara, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi guru,

program *reward* guru dan siswa berprestasi, *Smart Teacher* dan *Smart Student*, Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, revitalisasi bangunan sekolah sehingga nantinya seluruh sekolah di kota Padang Panjang memiliki standar yang sama baik itu pustaka, mushalla, kantin dan toilet sekolah. Diharapkan dengan berbagai kegiatan strategis di bidang pendidikan seluruh sekolah di Padang Panjang akan menjadi sekolah unggul dan terdepan. Kegiatan strategis lainnya untuk mendukung misi kedua adalah wisata rakyat dan pacu kudo, serta pembangunan *Learning Knowledge Center* dan museum digital, melanjutkan pembangunan kawasan Islamic Center dan *convention hall*.

Tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang sosial keagamaan melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Padang Panjang sayang disabilitas dan lansia dengan memberi pelayanan dan penghormatan kepada disabilitas dan lanjut usia, melalui penyediaan layanan khusus di bidang kesehatan, sosial dan keluarga serta kegiatan lansia bermakna. Disamping itu juga ada program Gelora Serambi Mekkah melalui beberapa kegiatan antara lain pejuang Subuh dan Shubuh Mubarakah, Magrib Mengaji, Smart Surau, Kampung Tahfidz dan Muzakarah Ulama.

3) KESEHATAN

Pembangunan pilar kesehatan diprioritaskan pada beberapa kegiatan strategis antara lain Dokter Warga, merupakan pelayanan langsung dokter kepada masyarakat di tingkat kelurahan, program Waliy Siaga (siaga melindungi) melalui pelayanan kesehatan darurat (PSC 119), program pendamping pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta Padang Panjang bergoro. Untuk mendukung misi kesehatan juga disukung dengan sarana prasarana olahraga sehingga direncanakan pembangunan *sports centre*.

4) PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pelayanan umum dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan paertisipatif ada beberapa program dan kegiatan strategis yang direncanakan antara lain program *e-governance* dengan kegiatan *command centre* dan program zona integritas dan gratifikasi dengan kegiatan pencegahan tindak

pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan melalui program ini nantinya dapat terwujud Padang Panjang Smart City, Kota Cerdas dan Berintegritas.

Pada pilar ini juga perlu ditingkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotong-royongan, termasuk dalam pembangunan kota.

Mengingat bahwa dalam dokumen visi dan misi Kepala Daerah, empat pilar tersebut dijadikan sebagai pokok misi, kemudian pokok-pokok misi tersebut diuraikan dalam kalimat misi dalam penyajian dokumen RPJMD Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi
Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023

No	Pilar/ Pokok Misi	Kalimat Misi Pembangunan Daerah
1	EKONOMI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3	KESEHATAN	
4	PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Untuk mencapai visi dilakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang.

Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan

yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam mengerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhhlak dan Berbudaya.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin di capai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, perlu dibangun suatu kerangka pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Kerangka pembangunan strategis tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai rumusan tujuan dan sasaran pembangunan melalui pengelompokan pilar/misi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang 2018-2023. Pengelompokan pilar/ misi pembangunan telah disusun menjadi 4(empat) Komponen yakni terkait dengan Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Kesehatan serta pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Keempat Komponen tersebut inilah kemudian di

kelompokkan ke dalam 3 (tiga) kalimat misi yang nantinya akan membentuk rumusan tujuan pembangunan dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Hubungan Komponen Pilar/Misi Dengan Tujuan Pembangunan
Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023

No.	Pilar/ Pokok Misi	Tagline	Kalimat Misi Pembangunan Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan
1	EKONOMI	Padang Panjang Assalam	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Padang Panjang Fathonah	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia
				Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis	Tingkat Penyelesaian pelanggaran
3	KESEHATAN	Padang Panjang Sehat		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
4	PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Padang Panjang Melayani	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif Inovatif dan Partisipatif	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keberhasilan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang dilihat dari kondisi akhir perencanaan pada tiap-tiap capaian indikator tujuan. Keberhasilan pencapaian visi

pembangunan Kota Padang Panjang. Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1) Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan

Pengembangan ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya ditengah arus ekonomi global. Peningkatan daya saing ekonomi juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, selaras dengan kemajuan aktifitas rakyat dalam menghasilkan produk-produk unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan berbagai karya lokal sesuai potensi yang ada.

Kota Padang Panjang sebuah kota kecil yang relatif tidak memiliki potensi sumber daya alam, namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, Pemerintah Kota Padang Panjang menitikberatkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk dapat menjadi salah satu pusat industri kulit di wilayah Sumatera dan pusat pengolahan susu dalam mendorong meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Selain perdagangan dan jasa, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi daerah antara lain Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, microfilm, foto dan sebagainya.

Selain itu juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yaitu Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kolam ombak, kolam arus, kolam berenang khusus wanita, kolam berenang khusus anak-anak, ember tumpah dan slidetower. Kota Padang Panjang juga terkenal dengan wisata religinya dengan mesjid Asasi Sigando dan Islamic Center, dan juga yang tak kalah menariknya adalah wisata pendidikan dengan Diniyyah Puteri, Thawalib, Pesantren Serambi Mekkah dan pesantren lainnya yang memang sudah sangat terkenal dari dulunya dalam hal Pendidikan Islam.

Guna mewujudkan tujuan meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah:

- a. Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.

Peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan terbukti cukup tanggung dalam menghadapi krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi ke depan diharapkan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi-ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi secara masif terutama masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan di Kota Padang Panjang. Sektor perdagangan perlu dikembangkan sebagai wujud implementasi ekonomi kerakyatan. Keberhasilan Kota Padang Panjang dalam meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,56%; laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,92%; laju pertumbuhan ekonomi sektor industri sebesar 2,46%; laju pertumbuhan ekonomi sektor penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 7,86%.

b. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah Kota Padang Panjang dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun sosial lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampak terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Keberhasilan pada sasaran dapat dilihat pada presentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebesar 1,5% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,33- 67,65 pada tahun 2023.

2) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah mutu tenaga kerja. Mutu tenaga kerja yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat dapat hidup secara mandiri dengan pendapatan yang semakin meningkat.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta program pembangunan daerah dalam meningkatkan pendapatan

masyarakat.Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan.Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan investasi sebanyak-banyaknya terutama sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui sasaran sebagai berikut :

a. Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi fenomena yang perlu di atasi segera agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Upaya untuk memperdayakan masyarakat miskin perlu di lakukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan. Berbagai program penanggulangan dilakukan untuk upaya pemberantasan kemiskinan ini antara lain juga melalui gerakan urang mudo berwira usaha, gerakan warga berdaya kota berjaya. Dengan berbagai program pemerantasan kemiskinan di harapkan kemiskinan dapat di turunkan sebesar 3,75% pada tahun 2023.

Disamping itu, ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pembangunan ekonomi masyarakat akan menjadi suatu keniscayaan apabila terjadi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Harapannya pembangunan Kota Padang Panjang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Keberhasilan sasaran ini dapat di lihat dari pencapaian Indeks Gini sebesar 0,24 pada tahun 2023; dan

b. Menurunnya Tingkat Pengangguran

Salah satu penyebab banyaknya pengangguran adalah minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian dari pencari kerja, termasuk pencari kerja terdidik. Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Kota Padang Panjang tentunya perlu program untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya melalui gerakan urang mudo kreatif berwirausaha yang nantinya akan mendorong kegiatan ekonomi dan penyerepan tenaga

kerja. Keberhasilan sasaran ini dapat di lihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,34% pada tahun 2023.

c. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial. Pendapatan masyarakat secara nyata berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan berbagai program yang ada terutama dalam pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan daya beli masyarakat meningkat sebesar 10,39 ribu rupiah tahun 2023;

3) Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berakhlak dan Unggul

Kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, salah satu fokus Pendidikan di Kota Padang Panjang adalah dengan gerakan literasi Padang Panjang bergerak yakni memberikan dukungan fasilitas pembangunan gerakan anak dan remaja gemar membaca, beraktifitas dan mengembangkan potensi bakat serta hobinya dalam rangka generasi masa depan Kota Padang Panjang yang lebih berkarakter dan mandiri agar masyarakat Kota Padang Panjang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Disamping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tagline Padang Panjang Sehat. Selain pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat, pembangunan karakter masyarakat juga perlu di lakukan melalui pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau dalam aktivitas masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul, maka sasaran pembangunan yang akan di capai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan.

Pembangunan kualitas pendidikan tidak hanya fokus pada prestasi siswa, peningkatan karakter juga menjadi salah satu point penting dalam menghadapi persaingan global. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian rata-rata lama sekolah sebesar 12,78; dan harapan lama sekolah sebesar 15,74 pada tahun 2023;

- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang berlangsung komprehensif dan berkesinambungan telah berdampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan tercapainya sasaran *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan bertambahnya angka harapan hidup, dan diperkirakan menjadi sebesar 72,49 tahun pada tahun 2023;

4) Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis tentunya ditandai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merajalela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat, permasalahan sosial dan permasalahan penyakit masyarakat ini tentunya tidak lepas dari norma dan nilai agama yang berkembang dimasyarakat. Dengan semakin meningkatnya penerapan norma dan nilai agama dalam masyarakat akan semakin tentram kehidupan sosial masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis maka sasaran pembangunan yang akan dicapai antara lain:

- a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis dan pelaksanaan berlangsung dengan lancar. Ketentraman dan ketertiban umum ditandai, salah satunya dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merajalela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban.

- b. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.

Pelayanan sosial merupakan salah satu urusan wajib dasar yang harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah, selain terkait pelayanan sosial aktivitas keagamaan juga menjadi salah satu prioritas pemerintahan periode ini untuk membangun nilai-nilai keagamaan didalam masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian Persentase Penurunan Jumlah PMKS sebesar 1,13 persen tahun 2023.

c. Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat.

Kota Padang Panjang yang sudah sangat terkenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah merupakan sebuah kota yang dalam kehidupan sehari-hari diwarnai dengan nuansa islami, yang tercermin dari kehidupan bermasyarakat yang diwarnai dengan Syariah Islam. Guna mempertahankan julukan ini maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pengamalan ajaran agama islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat diharapkan akan terwujud tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis. Sasaran ini diharapkan meningkat sebesar 100 persen pada tahun 2023.

5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tanpa adanya dukungan tat kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola pemerintahan secara umum di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang. Hal ini tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintah yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang dimulai dengan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berdasarkan uraian di atas, sasaran pembangunan ini adalah:

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Kinerja aparatur yang baik merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin baik kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin baik juga penyelenggaraan pemerintahannya. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan nilai 80,02 (A) pada tahun 2023; dan pada tujuan ini juga dicapai dengan sasaran

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian pembangunan dapat berhasil dimulai dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah dan semakin sedikit kebocoran anggaran akan semakin banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan kinerja sasaran ini dilihat dari pencapaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023; dan

- b. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani.

Salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat saat ini mendambakan aparatur yang melayani, keberhasilan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan tidak adanya keluhan pelayanan publik oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 82 (baik) pada tahun 2023.

6) Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi suatu keharusan. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan dan tidak hanya menjadi objek pembangunan saja. Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah menjadi suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Pembangunan daerah selain menuntut peran aktif masyarakat juga harus memberdayakan masyarakat tanpa memihak suatu golongan tertentu. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotongroyongan. Berdasarkan uraian di atas keberhasilan tujuan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dicapai melalui sasaran;

- a. Meningkatnya peran serta kelompok lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melibatkan segenap unsur masyarakat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah, harapannya

masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan dapat menentukan mana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang nyata dibutuhkan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebesar 90 persen pada tahun 2023.

b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

Pembangunan dewasa ini harus memperhatikan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam melakukan berbagai aktivitas Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) sebesar 83,10 pada tahun 2023.

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Target Keberhasilan
Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

VISI: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2019)	Target Akhir (2023)
I.	Misi I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
T1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	5,96	6,30
S1	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri 4. Laju Pertumbuhan	3,05 5,02 2,28 7,61	3,56 5,92 2,46 7,86

		Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
S2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 6. IKLH	0,50 65,25-66,57	1,50 66,33-67,65
T2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB Perkapita (Rp. juta)	48,19	58,05
S3	Menurunnya Angka Kemiskinan	7. Angka Kemiskinan	5,45	3,75
S4	Menurunnya Angka Pengangguran	8. Indeks Gini	0,28	0,24
S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	9. Tingkat Pengangguran Terbuka 10. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	4,84 10,29	4,34 10,39
II.	Misi II. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhhlak dan Berbudaya			
T3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,25	80,72
S6.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing Pendidikan	11. Rata-rata lama sekolah 12. Harapan Lama Sekolah	11,88 15,27	12,78 15,74
S7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13. Angka Harapan Hidup	72,47	72,49
T4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis	Tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keamanan	96,37	100
S8	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	14. Tingkat penyelesaian Pelanggaran, Ketertiban, Ketentraman, Keamanan	96,37	100
S9.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	15. Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2,34	1,13
S10	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	16. Persentase aktivitas keagamaan di masjid	38,82	100
MISI III. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif				
T5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	62	70
S11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 18. Opini BPK	B (60,1) WTP	A (80,02) WTP
S12	Terselenggaranya Pelayanan Publik	19. Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)	82 (Baik)
T6	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	2,30	2,34

S13	Meningkatnya Peran Serta Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	20. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70	90
S14	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	21. Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	83,10

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Panjang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 143 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2019)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	Indeks	5,96
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,05
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	5,02
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	%	2,28
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,61
6.	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	%	0,50
7.	IKLH	Indeks	65,25-66,57
8.	PDRB Perkapita	Rp. Juta	48,19
9.	Indeks Gini	Indeks	0,28
10.	Angka Kemiskinan	%	5,45
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,84
12.	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	(Ribu Rupiah)	10,29
13.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,25
14.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,88
15.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,27
16.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,47
17.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keamanan	%	96,37
18.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62
19.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	B (60,1)
20.	Opini BPK	Opini	WTP
21.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78 (Baik)
22.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	2,30

23.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	77,5
-----	----------------------------	--------	------

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
3. Menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

**Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019**

NO.	Sasaran/Program		Anggaran	Ket
				OPD
1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan		13.219.846.600	
	1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	197.545.000	Disdagkop UMKM
	2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.267.382.000	Disdagkop UMKM
	3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	529.490.000	Disdagkop UMKM
	4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	662.884.000	Disdagkop UMKM
	5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.664.316.000	Dinas Pariwisata
	6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.494.665.000	Dinas Pariwisata
	7.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	867.012.800	Dinas Pangan Pertanian
	8.	Program Peningkatan	1.775.288.000	Dinas Pangan

		Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan		Pertanian
	9.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	580.839.000	Dinas Pangan Pertanian
	10.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.886.274.800	Dinas Pangan Pertanian
	11.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	294.150.000	Dinas PMPTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur BerkelaJutan		49.772.317.452	
	1.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	7.009.177.170	Dinas PUPR
	2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	13.934.675.074	Dinas PUPR
	3.	Program Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	10.143.212.400	Dinas PUPR
	4.	Program Penerangan Jalan Umum	2.346.037.200	Dinas PUPR
	5.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	581.750.000	Dinas Perhubungan
	6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3.681.531.658	Dinas PUPR
	7.	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	419.098.800	Dinas PUPR
	8.	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.756.381.000	BPBD Kesbangpol
	9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	8.042.821.350	Dinas Perkim LH
	10.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup BerkelaJutan	1.073.265.000	Dinas Perkim LH
	11.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	784.367.800	Dinas Perkim LH
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan		2.781.477.300	
	1.	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.465.530.000	Disdagkop UMKM
	2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian	457.395.300	Dinas Pangan Pertanian

	3.	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	858.552.000	Dinas Perkim LH
4.	Menurunnya Angka Pengangguran		55.250.000	
	1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	55.250.000	Disdagkop UMKM
5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		557.845.000	
	1.	Program Pengembangan Rumah Wirausaha	465.345.000	Disdagkop UMKM
	2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	92.500.000	Dinas Pangan Pertanian
6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan		47.915.088.132	
	1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Masyarakat	2.517.999.504	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.	Program Padang Panjang Juara	674.188.000	Disdikpora
	3.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.512.338.500	Disdikpora
	4.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	42.210.562.128	Disdikpora
	5.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	4.548.796.000	Disdikpora
	6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1.134.221.000	Disdikpora
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		95.305.143.809	
	1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.718.515.800	Dinas Kesehatan
	2.	Program Pembekalan Gizi Masyarakat	198.074.000	Dinas Kesehatan
	3.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	695.395.000	Dinas Kesehatan
	4.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	322.570.500	Dinas Kesehatan
	5.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.334.395.000	Disdikpora
	6.	Program Layanan Kesehatan Rumah Sakit	65.944.396.509	RSUD
	7.	Program Pengendalian Penduduk dan KB	2.704.687.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
	8.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	13.387.110.000	RSUD
8.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		4.422.274.000	
	1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan	4.422.274.000	Satpol PP dan Damkar

		Pencegahan Tindak Kriminal		
9.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.387.578.500		
	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	415.133.500	Dinas Sosial PPKBPPPA	
	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	972.445.000	Dinas Sosial PPKBPPPA	
10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	10.192.889.200		
	1. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan	8.580.572.200	Setdako	
	2. Progam Pengelolaan Keragaman Budaya	1.612.317.000	Disdikpora	
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	14.066.796.820		
	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	616.760.797	Bappeda	
	2. Program Penelitian dan Pengembangan	1.502.905.000	Bappeda	
	3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	637.810.000	Inspektorat Kota	
	4. Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	227.596.250	Setdako	
	5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.324.745.000	BPKD	
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	252.168.000	BPKD	
	7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	420.667.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	8. Program Peningkatan Akses Kualitas Informasi Publik	2.580.200.750	Dinas Kominfo	
	9. Program Peningkatan Akses Kualitas Informasi Publik	2.580.200.750	Dinas Kominfo	
	9. Program Peningkatan Akses Kualitas Informasi Publik	2.580.200.750	Dinas Kominfo	
	10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	435.321.273	BKPSDM	

12.	Terselenggaranya Pelayanan Publik		1.737.003.892	
	1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.065.034.392	Dinas Duk Capil
	2.	Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	458.730.000	Bag. Organisasi
	3.	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.939.500	DPMPTSP
	4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	174.300.000	Dinas Duk Capil
13.	Meningkatnya Peran serta Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		10.272.885.250	
	1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.022.950.000	Kecamatan PP Timur
	2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.073.933.250	Kecamatan PP Barat
	3.	Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	2.639.807.000	Dinas Sosial PPKBPPA
	4.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.194.670.000	Disdikpora
	5.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	341.525.000	Dinas Sosial PPKBPPA
14.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan		448.414.000	
	1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	448.414.000	Dinas Sosial PPKBPPA

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 menyajikan informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian 6 tujuan dengan 6 indikator tujuan dan 14 sasaran strategis dengan 21 indikator sasaran strategis serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota

Padang Panjang, guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja Tujuan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang . Dalam pencapaian tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VIIc dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91	Sangat tinggi
2.	76 > 90	Tinggi
3.	66 > 75	Sedang
4.	51 > 65	Rendah
5.	50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Hasil Pengukuran pencapaian 6 tujuan dengan 6 indikator tujuan dan 14 sasaran strategis dengan 21 indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun 2019**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
I.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.96	5.59	93.79
S1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian,	3.05	3.67	120,33

		1.2	Kehutanan dan Perikanan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5.02	5.28	105.17
		1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	2.28	(2.74)	(120,17)
		1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.61	7.23	95,01
S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	1.2.1	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0.50	-	-
		1.2.2	IKLH	65.25-55.57	64,77	98,27
T2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.	PDRB Perkapita	48.19	64.75	134.36
S3.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	2.3.1	Angka Kemiskinan	5.45	5.60	97.25
		2.3.2	Indeks Gini	0.28	0.322	85
S4.	Menurunnya Angka Pengangguran	2.4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.84	4.35	110.12
S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	2.5.1	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10.29	11.013	107.03
II.	MENINGKATKAN PEMERATAAN KUALITAS DAYA SAING SDM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA					
T3	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Yang Sehat, Berakhlak dan Unggul	3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.25	78.00	99.68

S6	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	3.6.1 3.6.2	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	11,88 15,27	11,45 15,05	96,39 98,56
S7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.7.1	Angka Harapan Hidup	72,47	72,77	100,41
T4.	Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamais	4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96,37	100	103,76
S8	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.8.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96,37	100	103,76
S9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4.9.1	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2,34	10,42	445,29
S10.	Meningkatnya aktivitas keagamaan dimasyarakat	4.10.1	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di masjid	38,82	46,04	118,59
III	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, INOVATIF DAN PARTISIPATIF					
T5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	5	Indeks Reformasi Birokrasi	62	63,49	102,40
S11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.11.1 5.11.2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Opini BPK	B(60,1) WTP	B (60,64) WTP	100 100
S12	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	5.12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)	85,76 (Baik)	109,95
T6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	6	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	5,96	5,23	87,75
S 13	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	5.13.1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	70	100	142,86
S14	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	5.14.1	Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	74,45	96,06

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pemerintah Kota Padang Panjang secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 3 misi, 6 tujuan dengan 14 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2019 Pemerintah Kota Padang Panjang.

MISI I. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Misi Pertama RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan**. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu ditingatkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan 2 (dua) tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1

Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan

Pengembangan Ekonomi Daerah Yang Berbasis potensi unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global. Peningkatan daya saing ekonomi juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, selaras dengan pemajuan aktifitas rakyat dalam penghasilan produk-produk unggulan daerah dibidang pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan berbagai karya lokal sesuai potensi yang ada. Hasil evaluasi capaian kinerja Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 93.79 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Tujuan I Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Tar get	Reali Sasi	% Capai an	Tar get	Reali sasi	% Capai an	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	5.73	-	5.96	5.59	93.79	6,30

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi** belum mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 93.79 % dengan kriteria sangat tinggi. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kinerjanya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 5.59 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5.73. Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang terjadi sebagai imbas melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5.02. Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat adalah 5.05.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan** ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Strategis 1

Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang belum optimal yang ditandai pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi . Untuk itu diperlukan ditingkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang berbasis kerakyatan. Dalam hal ini yang menjadi yang menjadi unggulan daerah adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan industri. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Sasaran Strategis 1

**Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh
berbasis ekonomi kerakyatan**

No .	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	1.36	-	3.05	3.67	120,33	3,56
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	-	5.59	-	5.02	5.28	105.17	5,92
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	-	1.64	-	2.28	-2.74	-120.17	2,46
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	7.30	-	7.61	7.23	95.01	7,86

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian adalah 3,67% lebih tinggi 0,62 % dibandingkan target yang hanya 3,05%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2019 adalah 120,33% atau sudah melampaui target dengan kriteria sangat tinggi. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 3,56%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini sudah melampaui target sebesar 0,11%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan di sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Upaya yang dilakukan di sektor ini yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah Intensifikasi pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas padi. Penerapan sistem tanam jajar legowo, Pengembangan Pertanian Organik (sertifikasi produk organik, pemasaran melalui outlet produk organik di Pasar Pusat), Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi (termasuk pupuk organik), Pengendalian hama dan penyakit tanaman (pestisida nabati). Di Bidang Peternakan maka kerjasama dengan PT. Fonterra dan bantuan pendampingan dari Bank Indonesia mulai menampakkan hasilnya. Selain itu juga diintensifkan pemanfaatan

lahan pekarangan melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL dan Kelurahan Mandiri Pangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran adalah 5,28% lebih tinggi 0,20 % dibandingkan target yang hanya 5,02%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2019 adalah 105,17% atau melampaui target, dengan kriteria sangat tinggi. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 5,92%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini masih di bawah target sebesar 0,64%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan di sektor perdagangan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Upaya yang dilakukan di sektor ini yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah dimulainya Program Pasar ber SNI untuk Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang baru selesai dibangun pada Tahun 2018 dan beroperasional Tahun 2019. upaya tersebut dilakukan dengan berbagai pembenahan di Pasar Pusat Padang Panjang, di antaranya Pembenahan gedung entrance dan lain lain kelengkapan pasar, fasilitasi pengelolaan Pasar, penempatan pedagang ke dalam pasar, penyempurnaan penataan pedagang (zonasi, termasuk PKL). Di samping itu dilakukan juga pemantauan perkembangan harga di Pasar Pusat Padang Panjang setiap harinya dengan mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri adalah -2,74% lebih rendah 5,02 % dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 2,28%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2019 adalah -120,17% atau tidak mencapai target, dengan kriteria rendah. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 2,46%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini masih jauh di bawah target sebesar 5,10%. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah lesunya perkembangan global pada sejumlah industri unggulan Kota Padang Panjang. Salah satunya adalah industri kulit yang selama ini menjadi andalan Kota Padang Panjang, nyaris tidak mampu bergerak banyak sepanjang Tahun 2019 karena memang bisnis kulit secara nasional maupun global mengalami penurunan yang sangat drastis. Di sisi lain, industri pengolahan kapur juga mengalami kendala dari sisi legalisasi bahan baku sehingga tidak dapat beroperasi secara maksimal. Upaya yang perlu dilakukan di sektor ini ke depan adalah membantu meningkatkan kapasitas pelaku industri Kota Padang Panjang baik dari sisi keterampilan produksi, modal maupun pemasaran. Rumah Wirausaha yang sudah mulai dikembangkan sejak Tahun 2019 masih

perlu ditingkatkan sehingga mampu melahirkan pengusaha-pengusaha yang tangguh di sektor industri.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah 7,23% lebih rendah 0,38 % dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 7,61%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2019 adalah 95,01% dengan kriteria sangat tinggi. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 7,86%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini masih di bawah target sebesar 0,63%. Padahal Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mencatatkan peningkatan jumlah kunjungan wisata. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kemungkinan disebabkan karena terjadinya perubahan perilaku pada para pelaku wisata yang datang ke Kota Padang Panjang yang lebih banyak berwisata secara berkeluarga atau kelompok dengan membawa makanan dan minuman sendiri dan tidak berbelanja makanan dan minuman di Kota Padang Panjang. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pengusaha rumah makan dan restoran, karena itu artinya rumah makan dan restoran di Kota Padang Panjang mulai kehilangan daya tarik seperti yang selama ini didengung-dengungkan. Oleh karena itu rumah makan dan restoran yang ada perlu menyusun strategi peningkatan kunjungan konsumen, baik dari sisi harga, layanan, rasa maupun promosi.

Dari segi akomodasi pada dasarnya memang belum terlalu menggembirakan. Tingkat hunian hotel dan penginapan di Kota Padang Panjang bisa dikatakan stagnan dan belum menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kunjungan hotel di Kota Padang Panjang masih banyak dipengaruhi oleh ketidakmampuan Kota Bukittinggi menampung wisatawan yang menginap. Untuk itu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah bagaimana meningkatkan kunjungan ke Kota Padang Panjang yang bisa membuat pengunjung bermalam/menginap di Kota Padang Panjang, misalnya dengan meningkatkan promosi sebagai Kota Iven, menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan even-iven yang bisa diikuti dan dinikmati oleh wisatawan dengan durasi yang cukup panjang, seperti konferensi, kompetisi, dan lain-lain. Di sisi lain perlu didorong kepada pengusaha hotel dan penginapan yang ada agar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta layanan, sehingga bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk menginap di hotel atau penginapan di Padang Panjang.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan** adalah sebesar Rp.

13.219.900.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.580.705.669,- atau 86,39 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3.639.194.931,- atau 13,61 %

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Kondisi saat ini sebagian infrastruktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga kota, tempat parkir yang sangat terbatas seperti di pasar pusat, terminal yang belum berfungsi dengan baik, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah Kota Padang Panjang tergenang air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air lembah kota yang belum terpadu. Permasalahan lainnya terkait infrastruktur kota juga belum adanya standarisasi dari infrastruktur, seperti trotoar yang tidak standar dan tidak ramah disabilitas dan lansia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan maka permasalahan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang menjadi perhatian, dengan semakin pesatnya pembangunan tentu akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup. Beberapa permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang antara lain masih tingginya pencemaran air sungai, sampah dan penyediaan ruang terbuka hijau. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastrukstur Berkelanjutan** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Infrastrukstur Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	

1.	Persentase kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	-	-	0,50	-	-	1,50
2.	IKLH	69,78	66,31	95%	65,25-66,57	64,77	98,27	66,33-67,65

Sumber Data: Setdako Tahun 2019, Dinas Perkim dan LH Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Persentase Kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kota Padang Panjang baru dimulai pada tahun 2019 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja. IKLH pada tahun 2019 sebesar 64.77 tidak mencapai target. IKLH tahun 2019 pun mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 66.31. Tetapi capaian kinerja tahun 2018 sebesar 95 % mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 98.27 %.

Dari survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Padang Panjang Tahun 2019 didapatkan nilai kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Hasil Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Survey	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	81,84	B	Baik
2.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Perhubungan	70,14	C	Kurang Baik
3.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang jalan dan Trotoar)	76,05	C	Kurang Baik
4.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pasar, Islamic Center dan Ruang Hijau Publik)	66,72	C	Kurang Baik
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	75,14	C	Kurang Baik
6.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar	70,22	C	Kurang Baik

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas hasil survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang dilaksanakan atas kerjasama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan Universitas Andalas hanya Indeks Layanan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkinerja **Baik** sementara Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Perhubungan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang jalan dan Trotoar) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pasar, Islamic Center dan Ruang Hijau Publik), Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup,Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar berkinerja **Kurang Baik**. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dijadikan salah satu indikator keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rekomendasi perbaikan 6 jenis layanan infrastruktur untuk Pemerintah Kota Padang Panjang adalah :

1. Layanan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- 1) Memberikan layanan informasi terkait dengan penggunaan *wifi* milik pemerintah(kata sandi terbuka untuk masyarakat yang ingin mengakses);
- 2) Meningkatkan kapasitas kecepatan jaringan *wifi*;
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman untuk area yang memiliki ketersediaan *wifi*;

2. Layanan Infrastruktur Dinas Perhubungan

- 1) Inventarisasi kondisi kelayakan seluruh rambu lalu lintas;
- 2) Memperbaiki rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan;
- 3) Peletakan rambu lalu lintas pada tempat strategis dan mudah dilihat masyarakat;
- 4) Pembedaan tata letak jarak rambu yang lokasinya berdekatan agar tidak membingungkan.
- 5) Melakukan renovasi cat ulang bagi marka jalan yang memudar dan hilang.
- 6) Melakukan pengecoran lokasi parkir yang berlubang yang terdapat pada area publik;
- 7) Memberikan papan informasi petunjuk lokasi tempat parkir;
- 8) Memberikan peringatan dan hukuman bagi masyarakat yang parkir sembarang tempat;
- 9) Menata ulang lahan parkir yang tersedia;
- 10)Menyediakan juru parkir dan area parkir untuk pasar;

- 11) Memberikan papan informasi petunjuk sarana-sarana yang diperlukan untuk Disabilitas;
- 12) Memperhatikan kelayakan sarana disabilitas yang tersedia

3. Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu jalan, dan Trotoar)

- 1) Melakukan pendataan jalan utama area kelurahan yang belum dilengkapi trotoar;
- 2) Pembangunan trotoar baik ruas kiri dan kanan jalan, terutama jalan utama;
- 3) Memperbaiki trotoar yang rusak akibat akar pohon;
- 4) Menindak masyarakat yang menggunakan trotoar untuk berjualan dan parkir.
- 5) Mempercepat penyelesaian drainase;
- 6) Menyediakan papan informasi terkait fungsi drainase yang dipajang di area bangunan drainase;
- 7) Penggarukan dan pembersihan sampah yang tersumbat pada drainase secara berkala;
- 8) Membuat papan larangan membuang sampah kedalam drainase;
- 9) Membuat papan petunjuk sarana penunjang layanan disabilitas.

4. Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pasar, Islamic Centre, Ruang Hijau Publik

- 1) Penataan ulang area kios pedagang;
- 2) Membuat Pintu masuk pasar di semua sisi gedung bangunan pasar;
- 3) Himbauan kepada pedagang agar menjaga kebersihan pasar;
- 4) Perbaikan toilet di area pasar.
- 5) Memberikan papan informasi petunjuk sarana disabilitas yang terdapat di Islamic Centre dan Ruang Hijau Publik ;
- 6) Menciptakan ruang hijau publik disetiap kelurahan;
- 7) Penggunaan Islamic Centre untuk kegiatan keagamaan
- 8) Membuat media edukasi terkait keagamaan sebagai prasarana layanan tambahan Bagi masyarakat
- 9) Memperbaiki sarana fasilitas disabilitas di ruang hijau publik agar muat kursi roda.
- 10) Menjadikan Islamic Centre sebagai pusat kegiatan keagamaan

5. Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

- 1) Himbauan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya;
- 2) Menginventarisasi kelayakan bak sampah dan tempat sampah penampungan warga;
- 3) Mendistribusikan letak bak sampah merata dan sama jaraknya disetiap pemukiman Warga terutama yang jauh dari kota;
- 4) Menertibkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan;
- 5) Mensosialisasikan pentingnya saluran limbah terhadap masyarakat;
- 6) Memperhatikan kualitas bahan bangunan untuk rumah layak huni.

6. Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Kota Padang Panjang

- 1) Penataan ulang semua kios dan tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berada dilantai dasar (Terutama Blok B dan Blok C);
- 2) Memperbaiki toilet pengunjung di blok B dan blok C (Air sering mati , sehingga toilet sering kumuh);
- 3) Pembukaan akses jalan dari setiap sisi bangunan gedung pasar;
- 4) Perbaikan saluran limbah blok daging, ikan, dan ayam di gedung B lantai 1 dan gedung C lantai 1;
- 5) Evaluasi kinerja petugas kebersihan pasar
- 6) Perbaikan untuk kios yang retak drolling door yang macet di blok C lantai 2

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 64,77. Capaian tersebut berada dibawah target dan mengindikasikan penurunan kualitas lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran kondisi kualitas lingkungan yang terdiri dari komponen air, udara dan tutupan lahan. IKLH didapatkan dari 30% indeks kualitas air (IKA), 30% indeks kualitas udara (IKU) dan 40% indeks tutupan lahan (IKTL). Jika ditelaah dari indeks masing-masing komponen maka rendahnya IKLH lebih dipengaruhi oleh IKA. Dari target 40,50-41,40, realisasinya hanya 37,37 (kategori rendah). Sementara untuk IKU tergolong baik/tinggi (91,52), dan IKTL 65,26 termasuk kategori sedang. Dibandingkan dengan IKLH Tahun 2018, indeks kualitas lingkungan pada Tahun 2019 lebih rendah. Artinya pada Tahun 2019 terjadi penurunan kualitas lingkungan di Kota Padang

Panjang jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Penurunan yang signifikan terjadi pada kualitas kualitas air. Sementara kualitas udara dan tutupan lahan relatif stabil.

Mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, IKLH jangka menengah ditargetkan sebesar 66,33-67,65. Dengan target tersebut maka dibutuhkan upaya cukup besar terutama untuk perbaikan kualitas air. Mengingat keberhasilan capaian ini memerlukan dukungan semua pihak, maka diperlukan penguatan koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan yang mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Di tingkat nasional, IKLH Tahun 2019 ditargetkan sebesar 66,5-68,5 (Renstra KLHK 2014-2019). Target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target IKLH Padang Panjang. Target IKLH Padang Panjang ditetapkan lebih rendah dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kecenderungan data dari tahun ke tahun. Secara nasional target IKLH ditentukan oleh target IKA sebesar 55, IKU 84 dan IKTL 62. Dari target masing-masing indikator terlihat bahwa target untuk kualitas air Kota Padang Panjang lebih rendah dari target nasional. Namun target kualitas udara kota lebih tinggi dibandingkan target nasional, karena kecenderungan yang terjadi selama ini kualitas udara di Padang Panjang relatif baik. Untuk indeks kualitas tutupan lahan, indeks Kota Padang Panjang juga sedikit lebih tinggi dari indeks nasional karena keberadaan hutan yang cenderung tidak mengalami perubahan.

Tidak tercapainya target IKLH Tahun 2019 dipengaruhi oleh penurunan kualitas air. Rendahnya kualitas air ini terdeteksi pada sungai-sungai yang melintasi kota, bahkan sejak dari bahagian hulu yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik (rumah tangga), industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *E coli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *E coli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Sumber pencemar yang beragam memberi kontribusi terhadap tingginya pencemaran air. Selain itu tingkat pencemaran yang tinggi sudah terdeteksi sejak dari bagian hulu yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama dengan daerah tetangga.

Dari segi kebijakan, Pemerintah Daerah telah menyepakati Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang wajib

dijadikan acuan dalam berbagai perencanaan pembangunan di daerah. Selanjutnya berbagai perencanaan daerah seperti RPJMD ataupun RTRW juga mesti dilengkapi dengan suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diakomodir pada masing-masing perencanaan.

Pada tataran proyek atau pembangunan fisik, agar tanggung jawab pengendalian dampak berjalan dengan baik, maka setiap usaha dan/atau kegiatan harus dilengkapi dengan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan (setingkat Amdal atau UKL-UPL) pada prinsipnya berisi kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berasal dari pernyataan pemrakarsa sendiri. Oleh karena itu dokumen tersebut dijadikan instrumen untuk melakukan pengawasan apakah pemrakarsa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan seperti yang dinyatakan dalam dokumen lingkungannya. Berdasarkan hasil pengawasan 2019, didapatkan tingkat ketaatan teknis yang masih rendah yaitu sebesar 29,11% .

Selain izin lingkungan ada instrumen lain yang digunakan pada saat pengawasan yaitu SPPL. Dokumen ini merupakan pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha mikro kecil dan jumlahnya jauh lebih banyak dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib Izin Lingkungan. Terhadap objek ini tingkat ketaatannya diukur secara lebih sederhana dan hasil pengawasan menunjukkan tingkat ketaatan yang lebih baik yaitu 56%.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terutama pencemaran air. Limbah tinja manusia yang langsung dibuang ke sungai, sampah rumah tangga yang masuk ke badan air dan limbah cair usah/kegiatan yang dialirkan langsung ke badan sungai tanpa melalui pengolahan yang sesuai aturan mengakibatkan turunnya indeks kualitas air yang merupakan salah satu komponen perhitungan indeks kualitas lingkungan. Oleh karena itu telah dilakukan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan berupa pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola dampak usaha dan/atau kegiatannya. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan terhadap ketaatan masyarakat dan pelaku usaha ini berupa kegiatan pengawasan yang melibatkan petugas lintas OPD terkait dan aparat penegak hukum.

Untuk pengukuran kualitas lingkungan hidup, telah dilakukan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (air, udara, tanah). Data hasil pemantauan dan pengujian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

Selain itu, pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dapat membantu mengurangi masalah persampahan yang mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan hidup. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kerjasama dan koordinasi dari seluruh stake holder terkait dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan.

Tingkat kualitas lingkungan didukung oleh beberapa program baik yang terkait langsung, maupun tidak langsung. Program yang mendukung tingkat kualitas lingkungan yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan. Dalam program ini terdapat kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang menyediakan sarana prasarana persampahan yang memadai serta operasional pembiayaan personil pengelola sampah mulai dari penyapuan, pengangkutan, pembersihan saluran dan operasional di TPA sampah. Selain itu terdapat kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan yang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat terkait pengelolaan persampahan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dalam program ini terdapat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan yang memberikan sosialisasi terkait peningkatan kualitas lingkungan terhadap kader lingkungan dan masyarakat.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan** adalah sebesar Rp. 47.426.280.252,75,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.007.626.797,42 atau 81,52 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12.418.653.455,33 atau 18,48 %.

TUJUAN 2

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat pada suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Perkapita. Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kesejahteraan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sebesar 134,36 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Tujuan 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

No .	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
1	PDRB Perkapita	46.15	60.36	130.79	48.19	64.75	134.36	58.05

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator **PDRB Perkapita** terealisasi sesuai dengan target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 134.36 % dengan kriteria sangat tinggi. PDRB Perkapita Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar Rp. 64.75 juta, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 60.36 juta. Meningkat PDRB Perkapita Kota Padang Panjang terjadi sebagai dampak dari berbagai faktor. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap tersebut adalah lebih tingginya pertumbuhan PDRB dibandingkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDRB mencapai 5,59% sedangkan pertumbuhan penduduk hanya 1,32%. Pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan tersebut diiringi dengan rendahnya inflasi pada Tahun 2019 yaitu hanya, 1,66%. Pertumbuhan PDRB terbesar disumbangkan oleh Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (9,33%), diikuti oleh Jasa Lainnya (9,27%), informasi dan komunikasi (8,33%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,23%) dan Transportasi dan Pergudangan (7,05%).

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut

Sasaran Strategis 3

Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

Masalah kemiskinan dan kesenjangan menjadi isu strategis baik di daerah maupun nasional, karena masih banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada 3 tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Padang Panjang menunjukkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan. Sementara untuk Indeks Gini mengalami fluktuasi. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran masing-masing sebesar 97.25 % dan 85 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Sasaran Strategis 3

Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisa si	% Capaian	
1.	Angka Kemiskinan	-	5.88	-	5.45	5.60	97.25	3,75
2.	Indeks Gini	-	0.290	-	0.28	0.322	85	0,24

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan belum mencapai target. Indikator dari sasaran strategis ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat membandingkan capaian kinerjanya. Pada tahun 2019, capaian kinerja untuk indikator Angka Kemiskinan adalah 97.25 %. Sedangkan indikator Indeks Gini capaian kinerjanya adalah 85 %. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang diketahui bahwa Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 5.60 berkurang dari tahun 2018 sebesar 5.88.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Garis Kemiskinan itu sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi. Tahun 2017 ini angka kemiskinan di Kota Padang Panjang turun menjadi 6,17, tahun 2018 angka kemiskinan menjadi 5.88 , tahun 2019 angka kemiskinan menjadi 5.60. Pada tahun 2017 penduduk miskin Kota Padang Panjang sebanyak 3.220 orang. Pada tahun 2018 menurun menjadi 3.110 orang dan pada tahun 2019 penduduk miskin Kota Padang Panjang turun menjadi 3.000 orang.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Karena selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan

kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Berikut disajikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Penduduk miskin di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang Tahun 2017-2019

No	Tahun	P1	P2
1	2017	0.94	0.22
2	2018	0.88	0.22
3	2019	0.53	0.09

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan mengindikasikan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengindikasikan semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2018 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 8, sedangkan pada tahun 2019 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 5. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan apabila dibandingkan dengan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 8, sedangkan pada tahun 2019 Kota Padang Panjang berada pada peringkat 5

Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang paling sering digunakan adalah koefisien Gini (Gini Ratio) dan kriteria Bank Dunia.

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka Indeks Gini berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). GR bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang

sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan GR bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian GR di upayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jadi semakin besar nilai Gini Ratio, semakin besar ketidakmerataan distribusi pendapatan. Berikut ini Indeks Gini Kota Padang Panjang dari Tahun 2017-Tahun 2019

Tabel 3.10
Indeks Gini Kota Padang Panjang
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Gini Ratio
1	2017	0.300
2	2018	0.290
3	2019	0.322

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa Gini Ratio Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebesar 0.300 yang artinya distribusi pendapatan Kota Padang Panjang berada pada tingkat ketimpangan sedang. Keadaan ini mengalami sedikit perubahan pada tahun 2018 dimana Indeks Gini Kota Padang Panjang mengalami penurunan menjadi 0,290 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 0.322.

Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Hasil penghitungan distribusi pendapatan Kota Padang Panjang menurut kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan Kota Padang Panjang selama tahun 2017-2019 berturut-turut sebesar 21.64 persen, 37.29 persen, dan 20.53 persen. Berikut ini gambaran distribusi pendapatan Kota Padang Panjang menurut Bank Dunia :

Tabel 3.11
Distribusi Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2017-2019

No	Kriteria Pendapatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	20 % Teratas	38.83	21.35	40.40
2.	40 % Menengah	39.53	41.36	39.08
3.	40 % Terbawah	21.64	37.29	20.53

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Hal ini perhitungan Gini Ratio yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Padang Panjang mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat Kota Padang Panjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Menurunnya Angka Kemiskinan, Indeks Kedalamann Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Padang Panjang adalah :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PMKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN serta
2. Pengembangan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin perkotaan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan program Keluarga Harapan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian. Program ini dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Padang Panjang. Bantuan ini diberikan kepada KK miskin yang termasuk dalam Basis Data Terpadu. Bantuan kepada KK miskin berupa pemberian termak sapi sebanyak 8 KK masing-masing 2 ekor, ternak itik sebanyak 3 KK masing-masing KK mendapatkan 100 ekor, ternak kambing sebanyak 6 KK maasing-masing KK mendapatkan 3 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan.
5. Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin. Program ini dikelola oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. Program ini merupakan pemberian bantuan perbaikan warung beserta isi kepada 30 KK miskin yang termasuk dalam Basis Data Terpadu. Sebelum mendapatkan bantuan tim melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan bahwa KK tersebut layak untuk diberikan bantuan.
6. Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi. Program ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini ditunjang oleh Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Khusus Murid dari Kartu Indonesia Pintar.
7. Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman. Program ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Lingkungan Hidup. Bantuan bedah Rumah diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sumber dana Bedah Rumah berasal dari DAK dan dana dari Badan Stimulasi Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat. Bantuan dari DAK sebanyak 100 unit rumah tersebar pada 5 Kelurahan yaitu : 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Bawah, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Atas, 20 unit rumah di Kelurahan Koto Panjang, 20 unit rumah di Sigando. Sumber dana Bedah Rumah berasal dari dan dana dari Badan Stimulasi Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat. Bantuan Badan Stimulasi

Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat sebanyak 100 unit rumah tersebar pada 5 Kelurahan yaitu : 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Guguk Malintang, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Bawah, 20 unit rumah di Kelurahan Silaing Atas, 20 unit rumah di Kelurahan Koto Panjang, 20 unit rumah di Sigando.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan** adalah sebesar Rp. 2.324.082.000,00- dan terealisasi sebesar Rp. 1.961.374.689,72 atau 84,61%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 362.707.310,28 atau 15,39 %.

Sasaran Strategis 4

Menurunnya Angka Pengangguran

Angka Pengangguran cukup tinggi di Kota Padang Panjang, untuk itu perlu peningkatan efisiensi serta perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan minat kewirausahaan guna peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga hal tersebut secara langsung dapat menurunkan tingkat pengangguran. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Menurunnya Angka Pengangguran** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran masing-masing sebesar 110.12 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Sasaran Strategis 4
Menurunnya Angka Pengangguran

No .	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Tingkat Pengangguran	-	-	-	4.84	4.35	110.12	4,34

	Terbuka						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator **Menurunnya Angka Pengangguran** mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 110.12 % dengan kriteria sangat tinggi. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kinerjanya. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah 4.35, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera adalah 5.33 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional adalah 5.01. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang berada di bawah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional.

Namun jika dilihat dari ambang atas TPT dimana batas Tingkat Pengangguran Terbuka hanya 4% maka tingkat pengangguran Kota Padang Panjang berada di atas normal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ini antara lain dengan pemberian pelatihan keterampilan, memperluas lapangan kerja, bantuan modal serta bantuan ekonomi produktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui OPD teknis terkait. Kota Padang Panjang terdapat Balai Latihan Kerja telah dilakukan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja ini mereka nanti bisa berkerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang adalah :

1. Komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja
2. Adanya dukungan anggaran APBN sehingga jumlah pelatihan ketenagakerjaan yang dilaksanakan lebih banyak dan peserta yang mendapat pelatihan ketenagakerjaan juga meningkat.
3. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
4. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja
5. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Menurunnya Angka Pengangguran** adalah sebesar Rp.

55.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.208.000,00 atau 99,92%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 42.000,00 atau 0,08 %.

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik melalui kebijakan nasional maupun daerah berupaya untuk menjadikan masyarakat diberdayakan sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 107.03 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.13
Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	-	10.24	-	10.29	11.013	107.03	10.39

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Pengeluaran Perkapita Kota Padang Panjang adalah 11.013% lebih tinggi 0,77 % dibandingkan target yang hanya 10,29%. Dengan demikian capaian indikator ini tahun 2019 adalah 107,03% atau sudah melampaui target dengan kriteria sangat tinggi. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD, yang sebesar 10,39%, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini sudah melampaui target sebesar 0,62%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan di berbagai lapangan usaha PDRB, sehingga ditengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Padang Panjang tetap dapat tumbuh di atas 5%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir. Dari sisi permintaan akhir,

pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang didominasi oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB dan ini menunjukkan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat Kota Padang Panjang.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** adalah sebesar Rp. 74.599.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.877.450,00 atau 88,31 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.722.350,00 atau 11,69 %.

MISI II. MENINGKATKAN PEMERATAAN KUALITAS DAYA SAING SDM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA

Misi Kedua RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah **Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya**. Untuk mewujudkan misi kedua ini, pembangunan di Kota Padang Panjang diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan 2 (dua) tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN 3

Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang Sehat, Berakhlak dan Unggul

Tujuan dari Misi 2 Pemerintah Kota Padang Panjang adalah Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul. Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan dalam suatu negara. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi capaian dan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Tujuan III Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul

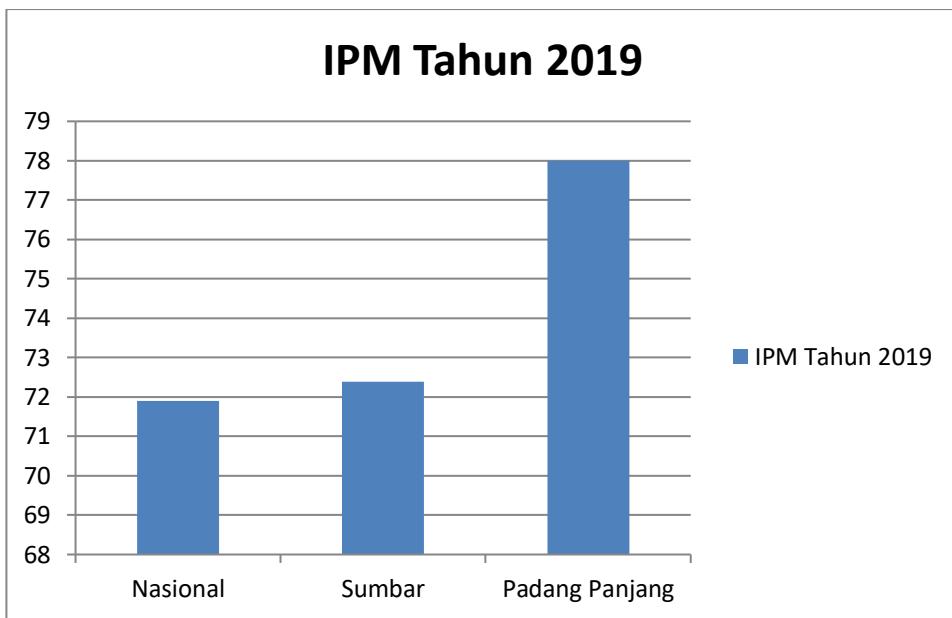
No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	77.30	-	78.25	78.00	99.68	80.72

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator tujuan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak belum mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 99.68 % dengan kriteria sangat tinggi. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan capaian kinerja dengan dengan tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*descent standart*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu : sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$). Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. Realisasi IPM Kota Padang Panjang termasuk kelompok tinggi ($70 \leq IPM < 80$). Dibandingkan dengan IPM Kota Padang Panjang tahun 2018 yaitu 77.30 dan pada tahun 2019 adalah sebesar 78,00 maka kenaikan IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah sebesar 0,70 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Tujuan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul tercapai dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.1
**Perbandingan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat dan IPM
Kota Padang Panjang Tahun 2019**



Apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Nasional Tahun 2019 sebesar 71.92 maka Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2019 diatas IPM Nasional dan apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebesar 72,39, maka Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2019 diatas IPM Provinsi Sumatera Barat .

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0.02 dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah ditahun 2019 menjadi 11.45

2. Meningkatkan harapan sekolah

Angka harapan sekolah di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0.02 dibandingkan dengan harapan lama sekolah ditahun 2018 menjadi 15.05

3. Meningkatkan angka harapan hidup

Angka harapan hidup di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,19 dibandingkan dengan angka harapan hidup di tahun 2018 menjadi 72.77

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul** telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan

Pendidikan adalah bagian sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Karena pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam membangun negara. Bahkan dalam pengukuran indeks pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme, pendidikan menjadi dimensi penting. Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan 2 indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat disuatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran masing-masing sebesar 96.39 % dan 98.56 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing Pendidikan

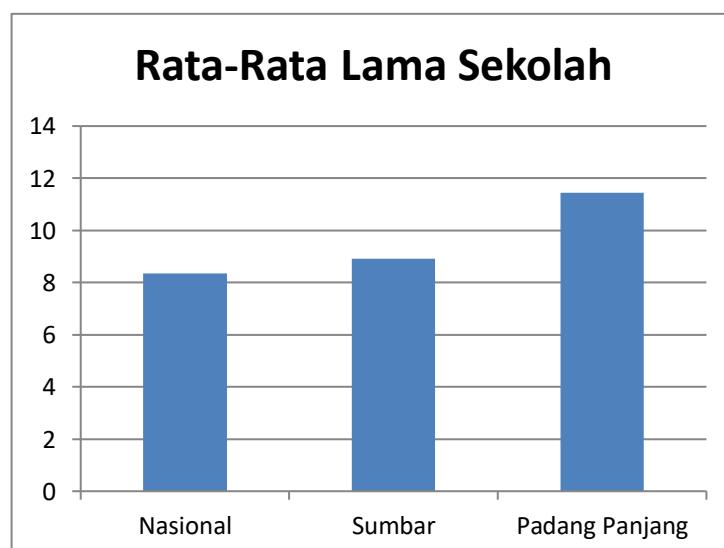
No.	Indika tor Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Tar get	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Rata-rata Lama Sekolah	-	11.43	-	11.88	11.45	96.38	12,78
2.	Harapan Lama Sekolah	-	15.03	-	15.27	15.05	98.56	15,74

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhhlak belum mencapai target. Capaian kinerja pada indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2019 sebesar 96.38 % dengan kriteria sangat tinggi sedangkan capaian kinerja pada indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 sebesar 98.56 %. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kinerja dengan dengan tahun sebelumnya. Tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah menunjukkan kenaikan 0.02.

- Rata-rata lama sekolah Kota Padang Panjang pada tahun 2019 sebesar 11.45 lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 8.77 dan juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Nasional sebesar 7.89. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Perbandingan Rata-rata lama Sekolah Nasional, Rata-rata lama Sekolah Sumatera Barat dan Rata-rata lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019



Angka rata-rata lama sekolah di Kota Padang Panjang sangat erat kaitannya dengan capaian beberapa indikator berikut ini :

1. Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang Tahun 2019 Persentase penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah adalah 79.28 sedangkan dan tidak sekolah lagi adalah 20.72 dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Umur	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7-12	36.84	0.27
13-15	16.33	0.38
16-18	17.90	1.19
19-24	8.21	18.94
7-24	79.28	20.72

Hal ini mengindikasikan banyaknya persentase penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun sampai dengan kelompok umur 16-18 tahun lebih banyak yang masih bersekolah dibandingkan dengan tidak sekolah lagi. Sedangkan pada kelompok umur 19-24 lebih banyak yang tidak sekolah lagi dengan yang masih bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah

2. Berdasarkan angka realisasi Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Kelompok	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
APK	106.27	95.80	108.72
APM	99.12	78.91	74.58

Hal ini mengindikasi bahwa tingginya angka partisipasi penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan Kota Padang Panjang. Tingginya angka partisipasi penduduk usia sekolah dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

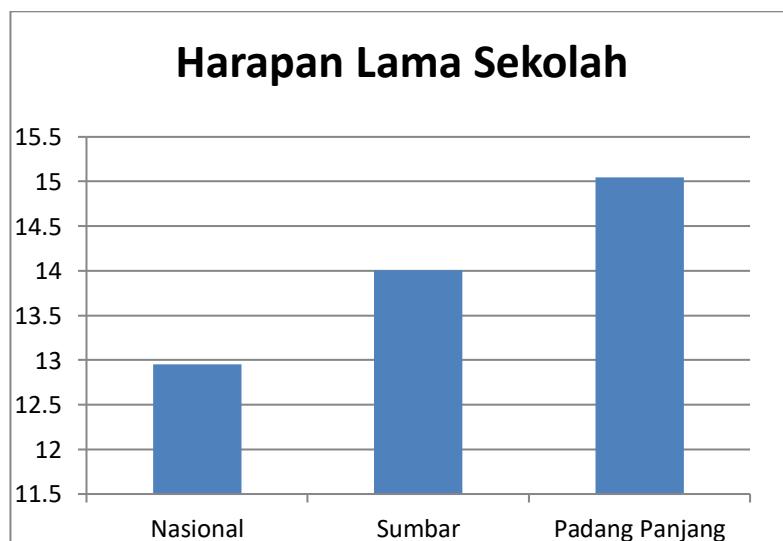
3. Berdasarkan realisasi Angka Putus Sekolah.

Angka Putus Sekolah di tingkat SD sebesar 0.18 SD dan angka putus sekolah SMP tahun sebesar 0.25 . Angka putus sekolah relatif sedikit karena kesadaran yang tinggi orang tua terhadap pendidikan anaknya. Di pihak sekolah, apabila terdapat murid putus sekolah maka kepala sekolah melakukan pendekatan persuasif dengan menjemput anak kerumah.

- Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 15.05. Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat adalah 14.01 sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah Nasional adalah 12.95. Dari data tersebut dapat diketahui Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang diatas rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional, Harapan Lama Sekolah Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019



Hal yang mempengaruhi tingginya angka harapan lama sekolah di Kota Padang Panjang adalah :

1. Cara pandang masyarakat Kota Padang Panjang akan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Jika kita melihat sejarah pada zaman dahulu pun di Kota Padang Panjang telah berdiri pesantren-pesantren seperti Dinniyah Puteri dan Perguruan Thawalib yang menunjukkan betapa orang tua begitu peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.
2. Tingginya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dana pendidikan juga ditunjang oleh APBD Kota Padang Panjang dan APBN . seperti Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang SD, SLTP dan SLTA, Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa Bidik Misi.
3. Terdapatnya beberapa Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang seperti Universitas Muhammadiyah, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Akademi Kebidanan, Perguruan Dinniyah Puteri. Disamping itu jarak Kota Padang Panjang dengan ibukota Propinsi dan kota-kota disekitar Padang Panjang seperti Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar dimana kota-kota tersebut terdapat Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
4. Meningkatnya akses, sarana dan prasarana serta mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan** adalah sebesar Rp. 30.663.462.561,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.214.329.218,76 atau 84,81%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.449.133.342,24 atau 15,19%.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.Derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian ibu, menurunnya angka kesakitan

maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup adalah merupakan salah satu komponen pembentuk IPM untuk menggambarkan umur panjang dan hidup sehat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100.41 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

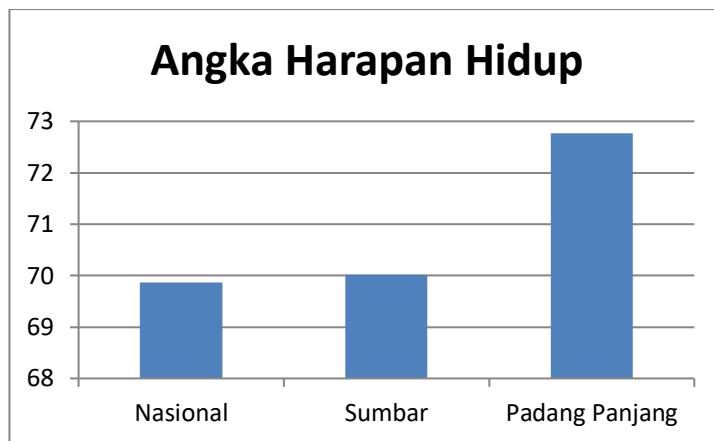
Tabel 3.16
Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Angka Harapan Hidup	-	72.58	-	72.47	72.77	100.41 %	72,49

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100.41 %. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan angka harapan hidup tahun 2018 sebesar 72.47, maka angka harapan hidup tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 72.77. Peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.4
Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional, Angka Harapan Hidup Sumatera Barat dan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019



Peningkatan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang antara lain didukung oleh capaian indikator sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang pada tahun 2018 adalah 0 per 1000 lahir hidup sebanyak 1.033. Pada tahun 2019 capaian AKI adalah 0 per 1000 lahir hidup sebanyak 1.033. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka kematian ibu di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah :

- 1) Adanya keterlibatan/peran masyarakat terhadap ibu hamil resiko tinggi.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) terutama difasilitas kesehatan, perlunya skrining PE (Penyelidikan Epidemiologi) di fasilitas kesehatan primer.
- 3) Penempatan Bidan diseluruh Kelurahan (Bidan Puskeske di Kota Padang Panjang, sehingga terpantau dan terawasinya kesehatan ibu hamil.
- 4) Terlaksananya pelayanan ANC (Antenatal Care) Terpadu bagi ibu hamil yang berkualitas baik di fasilitas kesehatan Puskesmas maupun swasta yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang meliputi pelayanan KIA, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular sehingga ibu hamil dan bersalin yang mengalami komplikasi mendapatkan penanganan tepat waktu.
- 5) Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil disetiap wilayah Puskesmas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang pemeriksaan kehamilan agar Ibu dan janin sehat, pesalinan aman, nifas nyaman ibu selamat sehingga kesadaran masyarakat meningkat khususnya ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin serta bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Penurunan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup. Capaian ini berada di atas target nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Target nasional Angka Kematian Bayi adalah 24 per 1.000 lahir hidup dan target Propinsi Sumatera Barat Angka Kematian Bayi adalah 24 per 1.000 lahir hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya angka kematian bayi di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah :

- 1) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan asfiksia dan BBLR, penerapan standar rujukan asfiksia dan BBLR, peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan kehamilan dan janin melalui pelaksanaan kelas ibu hamil di masing-masing desa, pemberian buku pintar bagi calon pengantin bekerjasama dengan Kementerian Agama.
- 2) Penempatan bidan di kelurahan sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan deteksi dini untuk mengetahui resiko tinggi ibu hamil serta melakukan rujukan pada kasus-kasus gawat darurat.
3. Telah terakreditasinya seluruh fasilitas kesehatan di Kota Padang Panjang. Fasilitas Kesehatan di Kota Padang Panjang terdiri dari 4 Puskesemas dan 2 rumah sakit.

4. Persentase Universal Health Coverage (UHC)

Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPKJamsostek, TNI, Polri dan Jamkesmas) diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), demikian pula dengan Program JKMP dan JKSS. Pemerintah bertanggungjawab untuk membayar kaniuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya termasuk dalam

sistem jaminan kesehatan. Berikut ini data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang Panjang Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Padang Panjang Per 31 Desember 2019

URAIAN	AKTIF
1. PBI APBN	12,212
Sub Total	12,212
2. PPU	
a. PNS	10,438
b. TNI/POLRI	1,501
c. Pejabat Negara	27
d. PPNP	704
e. Pegawai Swasta	1,787
f. DPRD	66
Sub Total	14,523
3. BUKAN PEKERJA	
a. Investor	4
b. Pemberi Kerja	1
c. Penerima Pensiu	2,397
d. Veteran	95
e. Perintis Kemerdekaan	4
Sub Total	2,501
4. PBPU / PESERTA MANDIRI	7,207
Sub Total	7,207
5. PBI APBD	8,485
Sub Total	8,485
6. JKMP	10,038
Sub Total	10,038
TOTAL	54,966

Sumber Data: Aplikasi BI BPJSKesehatan

Jumlah keseluruhan penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki penjaminan kesehatan pra bayar adalah 54,966 jiwa dibandingkan jumlah penduduk Kota Padang Panjang 57.767 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 95.15 % penduduk Kota Padang Panjang telah mendapatkan jaminan kesehatan.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat adalah

sebesar Rp. 102.671.820.744 dan terealisasi sebesar Rp. 85.260.373.002 atau 66,51 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 17.411.447.742 atau 33,49 %.

TUJUAN 4

Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamis

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamais ditandai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merajalela dalam kehidupan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Permasalahan sosial dan permasalahan penyakit masyarakat tentunya tidak lepas dari norma dan nilai agama yang berkembang dimasyarakat. . Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 103,76 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.18
Tujuan 4**

Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamis

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	95.16	-	96.37%	100 %	103.76	100

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2019 Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 103.76 %. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 56 kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Keseluruhan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang dalam Perda tersebut telah ditangani dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor-faktor pendorong tertangani seluruh kasus trantibum adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres
3. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
4. Perekutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
5. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat antara lain rasa aman, tenram dan tertib sehingga terhindar dari perilaku negatif serta tidak bertanggung jawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 103,76 % dengan

kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No .	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	95.16	-	96.37	100 %	103.76 %	100

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 103.76 %. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 56 kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Keseluruhan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang tertuang dalam Perda tersebut telah ditangani dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor-faktor pendorong tertangani seluruh kasus trantibum adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres
3. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
4. Perekutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
5. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp. 4.422.274.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.147.502.110 atau 74,8 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 274.771.890 atau 25,2 %.

Sasaran Strategis 9

Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 445 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Sasaran Strategis 9
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No .	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Targ et	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2 %	6.17 %	308, 5 %	2.34 %	10.42 %	445.29 %	1,50

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Rumus : $(\text{Jumlah PMKS tahun } n - \text{Jumlah PMKS tahun } n-1) / \text{Jumlah PMKS tahun } n-1 \times 100\%$

Jumlah PMKS Tahun n (2019) adalah sebanyak 3.934 PMKS

Jumlah PMKS Tahun n-1 (2018) adalah sebanyak 4.392 PMKS

Berdasarkan perhitungan rumus diatas dapat diperoleh angka realisasi penurunan jumlah PMKS yaitu sebesar -10,42%

Pada tabel berikut ini dapat dilihat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Padang Panjang dari Tahun 2018-2019:

Tabel 3.21
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Padang Panjang
dari Tahun 2018-2019:

No.	Jenis PMKS	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Anak Balita Terlantar	0	1
2	Anak Terlantar	26	19
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	6
4	Anak Jalanan	0	0
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	79	51
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	0	0
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	318	266
9	Penyandang Disabilitas	255	211
10	Tuna Susila	0	0
11	Gelandangan	1	0
12	Pengemis	5	3
13	Pemulung	5	1
14	Kelompok Minoritas	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	3	0
16	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3	13
18	Korban Trafficking	0	0
19	Korban Kekerasan	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0
21	Korban Bencana Alam	0	0
22	Korban Bencana Sosial	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	279	259
24	Fakir Miskin	3414	2985
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4	3
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0
JUMLAH		4392	3818

Sumber Data : Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah PMKS di Kota Padang Panjang sebesar 10.42% pada tahun 2019. Dari 26 jenis PMKS, yang mengalami penurunan secara signifikan adalah jenis PMKS Fakir Miskin yaitu pada tahun 2018 tercatat terdapat 3.414 fakir miskin di Kota Padang Panjang dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.985 fakir miskin yaitu turun sebanyak 429 fakir miskin.

Penurunan ini terjadi karena telah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kota Padang Panjang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya rumah tangga miskin yang telah graduasi mandiri dari data kemiskinan, dengan kesadaran dan sukarela keluar dari data kemiskinan Kota Padang Panjang.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan jumlah PMKS di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PMKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN serta
2. Pengembangan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Perkotaan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat dan pengembangan serta peningkatan kemandirian penyandang disabilitas berat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan organisasi PPDI.
5. Meningkatkan produktifitas lansia melalui penyediaan kebutuhan dasar dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok lansia di Kota Padang Panjang
6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihian trauma korban bencana
7. Peningkatan kualitas penanganan dan pemberdayaan penyandang penyakit sosial
8. Peningkatan kualitas penanganan bagi anak jalanan melalui fasilitasi rumah singgah
9. Penjaringan para pelaku usaha dalam penanggulangan kesejahteraan social
10. Penyediaan data base kemiskinan

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** adalah sebesar Rp. 1.387.578.500 dan terealisasi sebesar Rp. 904.994.424 atau 91 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 482.584.076 atau 9 %.

Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat

Sejalan dengan visi Padang Panjang yaitu “ Untuk Kejayaan Padang Panjang” dimana Kota Padang Panjang dijuluki Kota Serambi Mekkah. Dilihat dari sejarah, Padang Panjang dijuluki Kota Serambi Mekkah karena banyaknya pesantren dan sekolah agama yang berdiri di Kota Padang Panjang yang menghasilkan ulama-ulama terkenal seperti Buya Hamka, Zainuddin Labai El Yunussi dan Rahmah El Yunussiyah. Masyarakat Kota Padang Panjang menjalani kehidupan sesuai dengan sendi-sendi agama Islam dengan filosofi Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah. Sehubungan dengan itu dalam RPJMD Kota Padang Panjang menetapkan sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 118,59 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Sasaran Strategis 10
Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Aktifitas Kegiatan Keagamaan di masjid	-	-	-	38,82	46,04	118,59	100

Sumber Data : Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran Meningkatkan aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat mencapai melebihi target. Capaian kinerja untuk Indikator Persentase Aktifitas Kegiatan Keagamaan di Mesjid pada tahun 2019 sebesar 118,59 %. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.22
Aktifitas Keagamaan Di Kota Padang Panjang

No	Kegiatan Keagamaan	Bentuk Pembinaan	Jumlah Mesjid	Jumlah Mesjid Pelaksana/Tempat	Persentase

			Keseluruhan /Tempat Kegiatan	Kegiatan	
1.	TPQ	1. Pelatihan dan Pembinaan Guru 1. Evaluasi kegiatan TPQ	38	21	55,26
2.	Wirid Remaja	1. Wirid pengajian 2. Malam Bina Iman dan Takwa 3. Jambore Remaja se Kota Padang Panjang	38	20	52,63
3.	Kampung Tahfiz	1. Kegiatan Hafalan Al Qur'an 2. Tahsinul Qur'an 3. Setoran Hafalan ayat Al-Qur'an	16	2	12,5
4.	Majelis Taklim	1. Ceramah Agama 2. Pendalaman materi agama melalui tanya jawab	38	11	39,28
5.	Subuh Mubarakah	1. Shalat Subuh berjamaah 2. Ceramah agama 3. Pendalaman materi tanya jawab 4. Informasi pembangunan daerah	38	11	39,28
6.	BP 4	1. Pendalaman pemahaman ajaran agama melalui wirid Kopri	24	24	100
Rata-rata					49,82

Sumber Data : Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Tercapainya kinerja pada sasaran ini disebabkan antara lain :

1. Taman Pendidikan Al Quran telah dilaksanakan pada setiap masjid, tetapi untuk kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ dan Evaluasi Kegiatan TPQ baru dilaksanakan pada 21 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang.
2. Wirid Remaja telah dilaksanakan pada 20 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang dengan kegiatan Wirid Pengajian, Malam Bina Iman dan Taqwa dan Jambore Remaja.
3. Kampung Tahfiz baru terselenggara sebanyak 2 kampung tahfiz yaitu di Kelurahan Sigando dan Kelurahan Pasar Usang yang dilaksanakan di Mesjid Asasi Sigando dan

Mushalla Al Aqram. Peserta masing-masing Kampung Tahfiz adalah sebanyak 20 orang, berusia diantara 12 sampai dengan 20 tahun. Peserta dari kampung tahfiz melakukan pertemuan sekali seminggu dengan menyertakan hafalan, tajwid dan tahsinul Alquran kepada pembimbingnya.

4. Majelis Taklim telah dilaksanakan pada 11 mesjid dengan kegiatan ceramah agama dan pendalaman materi tanya jawab agama.
5. Subuh Mubarakah telah dilaksanakan pada 11 mesjid dengan kegiatan Shalat Subuh Berjamaah, Ceramah Agama dan pendalaman materi melalui tanya jawab agama
6. Wirid Korpri dilaksanakan dua kali dalam sebulan untuk menambah pemahaman agama Aparatur Sipil Negara.
7. Muzakarah Ulama dilaksanakan sekali dalam setahun dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tema yang dimusyawarahkan adalah
 - a. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam
 - b. Hukum aborsi dengan alasan darurat dan trauma pemerkosaan
 - c. Hukum Menggunakan Obat Penghalang Haid bagi Wanita saat Haji dan Umrah
 - d. Hukum Pewarisan anak dalam Kandungan, anak akibat Li'an, anak temuan dan anak angkat

Kegiatan tersebut diatas diharapkan dapat menambah pemahaman agama Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari dari semua kalangan, sehingga julukan Kota Serambi Mekkah tetap disandang oleh Kota Padang Panjang. Program yang menunjang pencapaian sasaran ini adalah Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya.

Perbaikan dimasa depan untuk sasaran strategis ini adalah :

1. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh masjid di Kota Padang Panjang
2. Kegiatan Wirid Remaja dan kegiatan keagamaan lainnya untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh masjid di Kota Padang Panjang.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat** adalah sebesar Rp.10.192.889.200 dan terealisasi sebesar Rp. 8.877.837.757 atau 84,63 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.315.051.443 atau 15,37 %.

MISI III. MENINGKATNYA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Misi ketiga RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif”. Untuk mewujudkan misi ini perlu dilakukan perubahan (reformasi) diberbagai sektor antara lain, reformasi birokrasi, reformasi manajemen sektor publik dan reformasi institusi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” dan “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan” sebagai tujuan untuk mencapai misi ketiga RPJMD Tahun 2018-2023. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Bagaimana kinerja birokrasi suatu pemerintahan daerah telah dikelola dengan baik dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian indikator kinerja pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.23
Tujuan 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	60.15	-	62	63.49	102.40	70

Sumber Data: Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator tujuan **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar** mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 102.40 % dengan kriteria sangat tinggi. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan capaian kinerja dengan dengan tahun sebelumnya.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah.Untuk mengetahui indeks reformasi instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap penerapan reformasi birokrasi setiap tahunnya.

Indeks Reformasi Kota Padang Panjang diharapkan meningkat setiap tahunnya.Oleh karena itu, indeks reformasi birokrasi tahun 2019 ditargetkan 62. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah 63.49 (kategori B) sebagaimana diuraikan pada tabel

Tabel 3.24
Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2019

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			Tahun 2018	Tahun 2019
I Komponen Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5	3.06	3.93
2	Penataan Peraturan Per UUan	5	3.13	3.13
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	5.67	6
4	Penataan Tata Laksana	5	3.58	3.08
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12.99	11.77
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3.00	4.38
7	Penguatan Pengawasan	12	4.80	6.66
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4.54	4.57
Total Komponen Pengungkit (A)		60	40.76	43.53
II Komponen Hasil				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8.22	8.22
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	6	3.00	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8.18	8.75
Total Komponen Hasil (B)		40	19.9	19.97
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	60.15	63.49

Sumber Data : Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2019

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3.34 % dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 2 tercapai dengan baik .

Dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, ada beberapa hambatan dan kendala yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Hambatan tersebut antara lain:

1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Kesulitan merubah mindset aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.
3. Belum maksimal penerapan manajemen kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan Bintek Reformasi Birokrasi kepada Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Menyusun Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Roadmap Reformasi Birokrasi.
3. Meningkatkan implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Kota Padang Panjang.
5. Mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar** telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah dilihat dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.Diharapkan nilai Evaluasi SAKIP meningkat setiap

tahunnya. Hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran daerah secara efektif dan efisien.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian system pemerintahan. Terdapat empat jenis opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat. Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini tertinggi yang di berikan BPK kepada instansi pemerintah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran menunjukkan 1 (satu) indikator sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi dan 1 (satu) indikator sebesar 100 %. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	CC	-	B (60,1)	B(60,64)	100 %	A (80,02)
2.	Opini BPK	WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100%	WTP

Sumber Data :Setdako Padang Panjang, BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencapai target..Capaian kinerja untuk Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu. Tahun 2018 nilai evaluasi SAKIP Kota Padang Panjang adalah 58,69 dengan predikat CC. Sedangkan untuk Tahun 2019 predikat SAKIP Kota Padang Panjang adalah B dengan nilai 60,64 berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/668/SS.05/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Perihal Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. Capaian nilai SAKIP

Kota Padang Panjang Tahun mengalami peningkatan sebesar 1,95. Rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.26
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,23
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,95
4.	Evaluasi Internal	10	7,02
5.	Capaian Kinerja	20	8,89
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,64
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber Data: Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Hambatan peningkatan implementasi nilai SAKIP Tahun 2019 antara lain :

1. Cascading kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja di level OPD belum menyuruh dan berjenjang.
3. Kualitas analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pada Pelaporan Kinerja belum merata dan belum didukung dengan data yang andal
4. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada tahun yang akan datang adalah :
 6. Melanjutkan penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
 7. Menyempurnakan *cascade* kinerja yang komprehensif dan berjenjang sesuai dengan tingkatan unit kerja serta selaras dengan proses bisnis organisasi dan penganggarannya

- guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, kegiatan, anggaran dan kinerja individu terhadap kinerja OPD.
8. Menyempurnakan kualitas rencana aksi pada seluruh perangkat daerah yang selaras dengan perbaikan cascade kinerja sehingga rencana aksi tersebut dapat dimanfaatkan OPD sebagai instrumen dalam pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.
 9. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan kinerja oleh OPD melalui analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja, serta analisis efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis.

Sedangkan untuk indikator Opini BPK, Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK tersebut adalah:

1. Rekonsiliasi data dengan OPD secara periodik
2. Melakukan sosialisasi mengenai kiat-kiat penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh PPK OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Melakukan pendampingan secara khusus kepada masing-masing OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Padang Panjang
4. Melakukan koordinasi dengan BPK dalam penyusunan laporan keuangan.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** adalah sebesar Rp. 13.702.115.547 dan terealisasi sebesar Rp. 11.615.018.281 atau 80,51 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.087.097.266 atau 19,49 %.

Sasaran Strategis 12

Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Melayani

Dalam mewujudkan *good governance*, pelayanan publik dituntut untuk mengarah pada pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik dijadikan salah satu indikator untuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Padang Panjang telah dilakukan semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Pelaksanaan survey dikoordinir oleh Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang. Pada tahun 2019 survey dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM) Universitas Andalas. Hasil evaluasi capaian kinerja Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Melayani dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 109.95 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.27

Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Melayani

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.31	80.39	91.65	78 (Baik)	85.76 (Baik)	109.95	82 (baik)

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencapai melebihi target. Capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 sebesar 109.95 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 91,65 %. Hasil survey menunjukkan bahwa dari 20 unit pelayanan, 5 unit pelayanan mendapatkan nilai Sangat Baik, 14 unit pelayanan mendapatkan nilai Baik dan 1 unit pelayanan mendapat nilai C sehingga capaian tahun 2019 rata-rata mencapai nilai interval sebesar 85.76 dengan Predikat Baik. Rincian hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

No	Unit Organisasi	Nilai Indeks Konversi (NIK)		Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
		Nilai Konversi	Nilai Survey		
1	Rumah Sakit umum Daerah	3.945	98.625	A	Sangat Baik

2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.337	83.425	B	Baik
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.071	76.775	B	Baik
4	Kecamatan Padang Panjang	3.477	86.925	B	Baik
5	Kelurahan Silaing Bawah	3.784	94.6	A	Sangat Baik
6	Kelurahan Silaing Atas	3.462	86.55	B	Baik
7	Kelurahan Pasar Usang	3.515	87.875	B	Baik
8	Kelurahan Kampung Manggis	3.228	80.7	B	Baik
9	Kelurahan Tanah Hitam	3.693	92.325	A	Sangat Baik
10	Kelurahan Balai Balai	2.926	73.15	C	Cukup
11	Kelurahan Pasar Baru	3.261	81.525	B	Baik
12	Kelurahan Bukit Surungan	3.621	90.525	A	Sangat Baik
13	Kecamatan Padang Panjang Timur	3.356	83.9	B	Baik
14	Kelurahan Ngalau	3.412	85.3	B	Baik
15	Kelurahan Guguk Malintang	3.425	85.625	B	Baik
16	Kelurahan Ekor Lubuk	3.437	85.925	B	Baik
17	UPTD. Puskesmas Koto Katik	3.439	85.975	B	Baik
18	UPTD. Puskesmas Kebun Sikolos	3.334	83.35	B	Baik
19	UPTD. Puskesmas Gunung	3.713	92.825	A	Sangat Baik
20	UPTD. Puskesmas Bukit Surungan	3.176	79.4	B	Baik
JUMLAH		3.4306	85.765	B	Baik

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada 20 instansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang melaksanakan pelayananpublik terdapat 5 instansi dengan mutu layanan Sangat Baik, 14 instansi dengan mutu layanan Baik dan 1 instansi dengan mutu layanan Cukup.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan terhadap pelayanan publik
2. Meningkatkan penerapan Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan pada OPD dan unit pelayanan.
3. Meningkatkan pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat kepada kepada OPD disektor pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas prilaku dan keprofesional aparatur pemerintah.
5. Meningkatkan fasilitas yang menunjang pelayanan publik.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Melayani adalah sebesar Rp. 1.737.003.892 dan terealisasi sebesar Rp. 1.578.759.803 atau 90,87 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 158.244.089 atau 9,13 %.

Tujuan 6

Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembangunan suatu daerah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah haruslah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pengecualian. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan **1** indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 87.75 % dengan kriteria tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Tujuan 6 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

No .	Indikator Kinerja	Tahun 2018			2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Reali sasi	% Capaian	Target	Reali Sasi	% Capai an	
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	-	5.96	5.23	87.75	6,30

Sumber Data : Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator tujuan Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan belum mencapai target. Capaian kinerja untuk Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2019 sebesar 87.75 %. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat membandingkan kinerjanya. Perhitungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat dari keaktifan masyarakat dari keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan pada masing-masing kelurahan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan di 16 kelurahan dan 2 kecamatan di Kota Padang Panjang adalah :

1. Gotong Royong rutin kelurahan
2. Pos Keamanan Lingkungan
3. Kehadiran masyarakat pada rapat-rapat kelurahan
4. Kehadiran masyarakat pada musrenbang RT
5. Kehadiran masyarakat pada musrenbang kelurahan
6. Kehadiran masyarakat pada musrenbang kecamatan
7. Keikutsertaan pada lomba-lomba
8. Keikutsertaan pada pertandingan-pertandingan olahraga.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan** telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 13

Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Berwenang untuk Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Menurut Asas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 142.86 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

**Tabel 3.30
Sasaran Strategis 13**

Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

No	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Target
----	-----------	------------	------------	--------

.	Kinerja	Tar get	Reali sasi	% Capai an	Target	Reali sasi	% Capaian	akhir RPJMD (2023)
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	-	-	-	70	100	142.86	90

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan mencapai melebihi target. Indikator pada sasaran strategis ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong berhasilnya pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Aktifnya lembaga masyarakat yang ada pada masing-masing kelurahan dan kecamatan di Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Setiap kecamatan terdiri dari 8 kelurahan, pada setiap kecamatan dan kelurahan terdapat lembaga kemasyarakatan masing-masing terdiri dari:

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga ini memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan.

2) Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Forum ini mengantisipasi tindak kriminal dimasing-masing kelurahan dan kecamatan, monitoring kelapangan persudut kelurahan yang rawan kriminalitas dan mengaktifkan kembali Siskamling.

3) Rukun Tetangga

Organisasi masyarakat yang dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Organisasi ini juga memfasilitasi permasalahan kependudukan seperti perubahan Kartu Keluarga, pindah datang, kelahiran, kematian, pendataan masyarakat tidak mampu. Terdapat 125 RT pada Kecamatan Padang Panjang Barat dan 103 RT pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

4) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Organisasi masyarakat yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan .Salah satu kegiatan PKK adalah memfasilitasi kegiatan Posyandu dan Dasa Wisma.

5) Karang Taruna

Merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial.Organisasi masyarakat ini memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pada masing-masing kelurahan. Karang Taruna aktif dalam hal keolahragaan dan kepemudaan

2. Komitmen pimpinan dalam hal ini Camat dan Lurah merupakan hal sangat menentukan dalam meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat pada masing-masing wilayahnya. Bagaimana seorang pimpinan dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang berada pada kepemimpinannya.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan adalah sebesar Rp. 10.272.885.250 dan terealisasi sebesar Rp. 7.017.415.668 atau 75,5 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.255.469.582 atau 24,5 %.

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Konsep Pembangunan menempatkan manusia sebagai perspektif pembangunan dimana manusia selain berperan sebagai pelaku pembangunan juga menjadi focus dan tujuan akhir proses pembangunan. Pembangunan yang dilakukan sejatinya tidak mengutamakansalah satu pihak dan mengesampingkan pihak lain sehingga terciptanya keselarasan dan kesetaraan. Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum bisa menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kota Padang Panjang selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Kota Padang Panjang, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih focus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indicator ini merupakan adopsi dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang disusun oleh UNDP.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 96.06 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.31
Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Target akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	81	76.10	94 %	77.5	74.45	96.06	83,10

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan belum mencapai target. Capaian kinerja untuk Indikator IDG Kota Padang Panjang Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 96 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 94 %.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase ekuivalen dengan distribusi merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Berikut ini capaian IDG beserta komposit Kota Padang Panjang tahun 2017-2019

Tabel 3.32
IDG Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

No	Komposit	2017	2018
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20.00	20.00
2	Perempuan sebagai tenaga profesional	65.00	59.75
3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	46.52	46.63
	IDG	76.10	74.45

Sumber Data: Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui IDG Kota Padang Panjang pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 76.10 pada tahun 2017 menjadi 74.45 pada tahun 2018, hal ini terutama terjadi karena penurunan dari persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang mengalami penurunan sebesar 5.28 poin pada tahun 2018. Tenaga profesional mengalami penurunan dalam komposit IDG karena kurangnya jumlah perempuan pada posisi kepala sekolah serta pejabat eselon. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai tenaga profesional adalah memberdayakan perempuan yang mempunyai kemampuan profesional di lembaga-lembaga formal.

Anggaran yang disediakan oleh APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan adalah sebesar Rp. 448.414.000 dan terealisasi sebesar Rp. 421.721.693 atau 94,05%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 26.692.307 atau 5,95 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 14 Sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2019 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.33
Pencapaian Kinerja Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi

Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	197.545.000,-	104.178.950,-	52,74
	2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.267.382.000,-	1.140.361.414,-	89,98
	3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	529.490.000,-	462.010.140,-	87,26
	4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	662.884.000,-	616.000.750,-	92,93
	5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.664.316.000,-	2.309.147.821,22	86,67
	6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.494.665.000,-	2.266.651.574,-	90,86
	7.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	867.012.800,-	791.066.029,-	91,24
	8.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.775.288.000,-	1.677.193.370,-	94,47
	9.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	580.893.000,-	506.577.487,-	87,21
	10.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.886.274.800,-	1.498.754.703,-	79,46
	11.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	294.150.000,-	286.996.470,-	97,57

Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	1.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	7.009.177.170	5.800.248.400,-	82,75
	2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	13.934.675.074,-	12.250.716.315,87	87,92
	3.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.143.212.400	8.629.660.287,80	85,08
	5.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	581.750.000,00	557.287.211,00	95,79
	6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3.681.531.658,75	3.304.442.953,75	89,76
	7.	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	419.098.800,0	287.653.866,00	68,64
	8.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	1.756.381.000	1.568.594.370	89,31
	9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	8.042.821.350,0	7.180.700.913,00	89,28
	10.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1.073.265.000,00	872.225.000,00	81,27
	11.	Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan	784.367.800,00	356.345.880,00	45,43

		Hidup dan Sumber Daya Alam			
Menurunnya angka kemiskinan	1.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.465.530.000	1.227.902.590,72	83,79
	2.	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Pemukiman	858.552.000,0	733.472.099,00	85,43
Menurunnya angka pengangguran	1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	55.250.000,00	55.208.000,00	99,92
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	74.599.800,00	65.877.450,00	88,31
Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.517.999.504,00	2.288.151.942,00	90,87
	2.	Padang Panjang Juara	674.188.000,00	390.652.800,00	57,94
	3.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.512.338.500,00	2.035.976.010,00	81,04
	4.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	19.275.919.557	17.095.557.762,76	88,69
	5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.548.796.000,00	4.322.889.404,00	95,03
	6.	Program Pendidikan Non Formal	1.134.221.000,00	1.081.101.300,00	95,32
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.470.461.735,00	13.475.578.080,50	77,13

	2	Program Perbekalan Gizi Masyarakat	198.074.000,0 0	120.064.850,00	60,62
	3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	695.395.000,0 0	276.433.150,00	39,75
	4.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	322.570.500,0 0	106.422.100,00	32,99
	5.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.334.395.000 ,00	986.367.579,00	73,92
	6.	Progam Layanan Kesehatan Rumah Sakit	65.944.396.50 9	56.654.646.454	85,91
	7.	Program Pengendalian Penduduk dan KB	3.319.418.000	2.644.177.924	79,66
	8.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	13.387.110.00 0	10.996.682.864, 50	82,14
Meningktnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.422.274.000	4.147.502.110	74,80
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	415.133.500	384.845.64	92,70
	2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	972.445.000	866.509.860	89,11
Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	1.	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan	8.580.572.200	7.571.528.775	88,24

	2.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.612.317.000	1.306.308.982	81,02
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	616.760.797	541.614.211	87,82
	2.	Program Penelitian dan Pengembangan	1.502.905.000 ,	1.186.122.543	78,92
	3.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	637.810.000	477.794.572	74,91
	4.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	227.596.250	130.902.214	57,52
	5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.324.745.000	908.979.582	68,62
	6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	252.168.000	155.539.192	61,68
	7.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	420.667.000	400.033.832	95,10
	8.	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	2.580.200.750	2.381.851.284	92,31
	9.	Program e-Government	6.068.662.750	5.361.670.451	88,35
	10.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.600.000	70.510.400	99,87

Terselenggaranya Pelayanan Publik	1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.065.034.392	991.705.620	93,11
	2.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	458.730.000	391.027.333	85,24
	3.	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.939.500	36.440.000,	93,58
	4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	174.300.000	159.586.850	91,56
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1.	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.022.950.000	1.246.330.385	41,23
	2.	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.073.933.250	1.850.348.554	60,19
	3.	Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	2.639.807.000	2.568.732.57	97,31
	4.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.194.670.000	1.038.237.586	86,91
	5.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	341.525.000	313.766.573	91,87
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	448.414.000	421.721.693	94,05

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

LKjIP Kota Padang panjang berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Mengupayakan peningkatan kunjungan wisatawan
4. Mengupayakan peningkatan waktu rata-rata lama menginap wisatawan
5. Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
6. Optimalisasi kelembagaan UMKM
7. Mendorong berkembangnya sektor UMKM
8. Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri
9. Menyesuaikan dokumen perencanaan jangka panjang dan tata ruang wilayah
10. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor
11. Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM
12. Meningkatkan peran lembaga penyaluran dana bergulir
13. Mendorong UMKM dan Koperasi mengakses modal dari lembaga penyaluran dana bergulir
14. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
15. Menumbuhkan koperasi-koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis (sektor riil)
16. Mengoptimalkan kinerja koperasi
17. Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit

18. Membangun kawasan strategis pariwisata yang didukung oleh stakeholder terkait dengan berbasis pada wisata alam, budaya lokal, kuliner dan produk unggulan daerah
19. Mengoptimalkan pengelolaan PIHP
20. Penataan kawasan perdagangan Bukit Surungan yang dititikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung
21. Penataan kawasan pasar pusat
22. Mengoptimalkan kinerja pengawasan
23. Pembentukan UPTD kemetrologian
24. Mensinergikan pengembangan sektor pertanian, perternakan dan perikanan dalam satu kawasan

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut diatas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 diarahkan dalam yaitu :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
2. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW
3. Optimalisasi pemasaran pariwisata
4. Membenahi objek wisata yang telah ada dan mengembangkan objek wisata baru
5. Intensifikasi pertanian
6. Peningkatan kelembagaan UMKM
7. Fasilitasi pelaku UMKM sesuai bidang usaha
8. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Propinsi dan Pusat terkait pengembangan industri kapur
9. Melaksanakan revisi RPJP dan RTRW
10. Menyusun Perda tentang investasi
11. Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM unggulan
12. Meningkatkan motivasi pelaku IKM unggulan
13. Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan
14. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran
15. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha
16. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
17. Penambahan modal BLUD UPTD pengelolaan dana bergulir
18. mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
19. meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk
20. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi
21. Optimalisasi UPTD Pengolahan Kulit
22. Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit
23. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
24. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan kepariwisataan
25. Memberikan insentif investasi sesuai kewenangan daerah
26. Meningkatkan peran serta dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan PIHP

27. Mengoptimalkan fungsi terminal, memperlancar arus lalulintas orang dan barang
28. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
29. Revitalisasi pasar pusat
30. Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar
31. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen
32. Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD Kemetrologian
33. Menyediakan sarana prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- **Pendapatan :**
Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 619.867.811.922,- setelah perubahan sebesar Rp 600.424.240.309.-
(berkurang Rp. 19.443.571.613,-).
- **Belanja :**
Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 682.367.811.922,- setelah perubahan menjadi Rp. **669.333.921.732,60**
(berkurang Rp. 13.033.890.189,40).
- **Pembiayaan :**
 - a. Penerimaan
Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. 62.500.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 68.909.681.423,60)
(bertambah Rp. 6.409.681.423,60).
 - b. Pengeluaran
Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.0,00

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- b. Percepatan infrastruktur pendukung aktifitas ekonomi masyarakat;

- c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
- e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kota Padang Panjang lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokan kedalam **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Syah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019
Per 31 Desember 2019

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Pendapatan :			
a.Pendapatan Asli Daerah	87.837.855.572	77.323.150.456	88,03
Pendapatan pajak daerah	8.520.000.000	9.048.983.279	106,21
Pendapatan retribusi daerah	5.463.652.186	4.624.073.616	84,63
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.058.783.025	6.058.783.025	100,00
Lain-lain PAD yang sah	67.795.420.361	57.591.310.535	84,95

b.Dana Perimbangan	483.588.188.000	470.327.013.598	97,26
Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	10.262.734.000	8.358.664.947	81,45
Dana alokasi umum	390.262.667.000	390.319.648.000	100,01
Dana alokasi khusus	65.821.696.000	54.407.609.651	82,66
Dana Intensif Daerah (DID)	17.241.091.000	17.241.091.000	100
c.Lain-lain pendapatan yang sah	30.645.211.737	30.686.974.893	100,14
Pendapatan Hibah	7.480.000.000	8.162.200.000	109,12
Dana bagi hasil pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.165.211.737	22.524.774.893	97,24

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja di upayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam

penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja daerah dikelompokan kedalam **Belanja Opreasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga** dan **Transfer** masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.34
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Per 31 Desember 2019

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah :	670.980.936.732,-	600.204.262.751,32	89,45
a.Belanja Tidak Langsung	278.962.745.453,75	264.925.646.718	94,96
Belanja Pegawai	268.649.725.453,75	256.801.711.815,00	95,59
Belanja Hibah	6.656.100.00,00	5.253.694.572,00	78,93
Belanja Bantuan Sosial	2.695.920.000,00	2.294.310.919,00	85,10
Belanja Bantuan Keuangan/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	661.000.000	565.929.412	85,62
Belanja Tidak Terduga	300.000.000		
b.Belanja Langsung	392.018.191.278,85	335.288.616.033,32	85.89
Belanja Pegawai	4.781.048.500,00	3.611.098.606,-	75.53
Belanja Barang dan Jasa	276.195.603.006	233.488.735.879,35	85.04
Belanja Modal	111.041.539.772,85	98.188.781.547,97	88.43

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

3.3.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan probabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Girp/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan daerah dikelompokan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.35
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019
Per 31 Desember 2019

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
Pembiayaan :	68.909.681.423,60	68.909.681.423,60	100
Penerimaan Pembiayaan	68.909.681.423,60	68.909.681.423,60	100
Penggunaan SILPA	68.909.681.423,60	68.909.681.423,60	100
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	68.909.681.423,60	128.606.014.888,07	100
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
Pembiayaan Neto	68.909.681.423,60	68.909.681.423,60	100
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	-		

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban Akuntabilitas Pemerintah Daerah sekaligus dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain pencapaian tahun pelaporan 2019, juga disajikan pencapaian tahun sebelumnya dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum dari 21 indikator nampak bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 telah berhasil mencapai kinerja sasaran.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memastikan Pencapaian Kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja Tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari Kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi Perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang ke depan. Pertama, walaupun beberapa indikator telah mencapai target, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa di jawab dengan baik pula. Peran pemerintah Kota Padang Panjang sangat diperlukan untuk memastikan pelayan publik secara maksimal dapat terlaksana di Kota Padang Panjang dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan sehingga tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dapat meningkat.

Kedua hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kota Padang Panjang dengan berbagai unsur di wilayah Kota Padang Panjang. Daerah yang berbatasan dengan Kota Padang Panjang maupun juga dengan pihak-pihak diluar pemerintah. Beberapa indikator seperti peningkatan pendapatan dan penurunan angka pengangguran menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat.

Tanpa koordinasi dan sinergis yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting di pergunakan oleh instansi dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan laporan kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

**PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OLEH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
PADA TAHUN 2019**

I. TINGKAT NASIONAL

1. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2018-2019 Tanpa Pengecualian.
2. Penghargaan "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" Tahun Anggaran 2018 dari BPK RI yang merupakan opini tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas nama Walikota Padang Panjang.
4. Juara 1 untuk kategori Kota Kecil Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2019 dari Litbang Kompas Group Media.
5. Apresiasi Juara 1 Tingkat Nasional (Setara) Seleksi Year Program 2019-2020 Kennedy Lugar Youth Exchange & Study Program (YES) atas nama Puteri Nabila Marfa.
6. Anugerah Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019 untuk Kategori Kota Kecil dari ITB.
7. Mendapat Penghargaan dari ICSB Indonesia Presedential Award Tahun 2019,dengan Kategori Policy Marker.
8. Peringkat BAIK (B) dengan indeks 3,75 dalam penilaian Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Predikat sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
10. Penilaian Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan kelulusan "PARIPURNA".
11. Penilaian Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "SANGAT BAIK" dari Menpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
12. Juara II Stand Florikultura Indonesia Tahun 2019 Tingkat Nasional
13. Penghargaan Tertinggi Kota Sehat Tingkat Nasional (Swasti Saba Wistara).
14. Juara III Tingkat Nasional pada Lomba Cipta Menu B2sA pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 November 2019.
15. Juara III Tingkat Nasional Olimpiade Guru Nasional Tingkat Nasional atas nama Endar Madesa, M.Pd.

16. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya.
17. Peringkatat Pembina Forum Anak terbaik.
18. Pelopor ruang bermain Ramah anak taman lembuti Kota Padang Panjang Tersertifikasi

II. TINGKAT PROPINSI

1. Piagam penghargaan sebagai Juara I lomba Pasar Kodya Tingkat Propinsi Sumatera Barat sebagai pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Tahun 2019
 2. Juara I Lomba membuat Burger PA pada Livestock Expo Peternakan Tahun 2019 yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2019
 3. Juara I Lomba Kreasi Bekal Anak pada Livestock Expo Peternakan Tahun 2019 yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2019
 4. Juara I lomba Pasar Kodya Tingkat Propinsi Sumatera Barat,sebagai pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Tahun 2019
 5. Juara I Lomba Asuhan Mandiri (an. Asman) Tingkat Propinsi
 6. Juara I LPM yang diraih oleh Kelurahan Ganting
 7. Juara I Gerakan PKK jenis kegiatan Administrasi PKK yang diraih oleh Kelurahan Tanah Pak Lambik
 8. Juara I Gerakan PKK jenis kegiatan IVA TEST yang diraih oleh Kecamatan Padang Panjang Timur
 9. Finalis(Setara Juara 1 Tingkat Propinsi)Duta Rumah BelajarTahun 2019 atas nama Rahmad Habibullah, S.Pd.I.
 10. Finalis(Setara Juara 1 Tingkat Propinsi) Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019 atas nama Fitria Diane Pratiwi Syukri, S.S.
 11. Emas(Setara Juara 1 Tingkat Propinsi) POPDA Sumatera Barat atas nama Afri Ghozali Wibowo
 12. Emas(Setara Juara 1 Tingkat Propinsi)Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Propinsi atas nama Wahyu Dian Alfath
 13. Finalis(Setara Juara 1 Tingkat Propinsi)Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional atas nama Sandi Rahmat Alzari
 14. Juara 1Tingkat PropinsiOlimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs Tingkat Propinsi atas nama Viagi Anfasini
 15. Juara I Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Sumatera Barat
-

16. Juara I Lomba Orsos/LKS
 17. Juara I Ajang Kreativitas Seni dan Budaya GenRe Fellowship Goes To 5GE
 18. Juara I GenRe Voice pada GenRe Fellowship Goes To 5GE
 19. Juara I IVA Test Kecamatan Padang Panjang Timur
 20. Peringkat II Stand terbaik dalam rangka Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2019

 21. Juara I UP2K Kelurahan Pasar Baru
 22. Juara II Tingkat Propinsi Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi Tingkat Propinsi atas nama Hilda Fitria Eka Putri, S.Pd.
 23. Juara II Tingkat Propinsi Lomba Mewarnai/Hari Pendidikan Nasional Tingkat Propinsi atas nama Raisa Callysta
 24. Juara II Tingkat Propinsi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs Tingkat Propinsi atas nama Marisa Dava Kumairah
 25. Juara II Tingkat Propinsi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs Tingkat Propinsi atas nama Reno Ali Putra
 26. Juara II pada seleksi Media Tradisional tingkat Propinsi Sumatera Barat pada bulan September 2019 yang diwakili oleh Sanggar Kesenian Kuciang Tuo
 27. Juara II Lomba Kader Dasawisma yang diraih oleh Kelurahan Ngalau
 28. Juara II Lomba Kader Posyandu yang diraih oleh Kelurahan Koto Panjang
 29. Juara II Lomba Kelurahan Berprestasi yang diraih oleh Kelurahan Koto Panjang
 30. Juara II Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Propinsi
 31. Perunggu (Setara Juara 3 Tingkat Propinsi) POPDA Sumatera Barat atas nama Andry Vernandes
 32. Juara III Tingkat Propinsi Kuis Kihajar Tingkat Propinsi atas nama Sandi Rahmat Alzari
 33. LKD peringkat 3 karsipan eksternal tingkat Sumatera Barat (peringkat 7 nasional)
 34. Peringkat V Pemeringkatan Badan Layanan Publik Thn 2019 Tingkat Sumbar berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi Informasi Sumatera Barat pada bulan November 2019
 35. Penerimaan anugrah literasi di bidang media elektronik tingkat Sumatera Barat
 36. Penerimaan anugrah literasi kategori wartawan terbaik tingkat Sumatera Barat
 37. Juara III Lomba penyuluhan KB A.n Maryulis, S.Sos. M.Ikom
-

38. Juara III Lomba Dasawisma Kelurahan Ngalau
39. Juara III Putra Duta GenRe Jalur Pendidikan
40. Juara III Kerbau Jantan pada Livestock Expo Peternakan Tahun 2019 yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 25 s/d 28 Juni 2019
41. Juara III Lomba membuat Burger PI pada Livestock Expo Peternakan Tahun 2019 yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2019
42. Penghargaan GSB (Gerakan Sumbar Bersih) untuk Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang Tahun 2019
43. Juara Harapan III Lomba Baju Kurung Basiba pada Livestock Expo Peternakan Tahun 2019 yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2019

44. Lomba Cipta Menu B2sA Juara III Tingkat Propinsi Sumatera Barat yang diadakan di Padang tahun 2019 yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 29 November 2019
45. Penghargaan Sekolah Adiwiyata, antara lain:
 - 1) DMP/MTs Diniyah Putri Kota Padang Panjang
 - 2) SMP 1 Kota Padang Panjang
 - 3) SMP 5 Kota Padang Panjang
 - 4) SDN 05 Pasar Usang Kota Padang Panjang
 - 5) SDN 08 Kampung Manggis Kota Padang Panjang
 - 6) SDN 13 Ganting Kota Padang Panjang
 - 7) SDN 16 Koto Katik Kota Padang Panjang
46. Penghargaan Kampung Iklim Utama 2019 pada Program Kampung Iklim:
 - 1) Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang Panjang
 - 2) Kelurahan Pasar Usang Kota Padang Panjang
47. Pada kegiatan Pemilihan Uda dan Uni Tingkat Propinsi Sumatera Barat meraih Juara Uni Ambasador dan Uda Intelegensia
48. Koperasi Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat adalah Kopkar Yarsi
49. Juara I Tingkat PropinsiLomba Sekolah Sehat yang diraih oleh TK Negeri Pembina Kota Padang Panjang